

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000 – TAHUN ANGGARAN 2003
STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

YOHANES PAULUS T.TUKAN

NIM: 992114160

NIRM: 990051121303120160

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2005

SKRIPSI

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000 – TAHUN ANGGARAN 2003
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur**

Oleh :

**YOHANES PAULUS T.TUKAN
NIM: 992114160
NIRM: 990051121303120160**

Telah disetujui oleh :

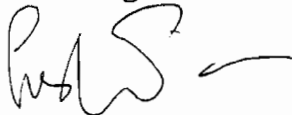
Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.

Tanggal: 18 Agustus 2005

Pembimbing II



Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.

Tanggal: 30 Agustus 2005

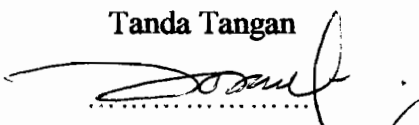
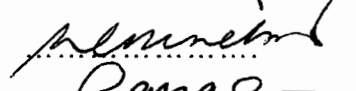
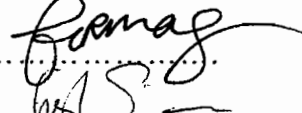
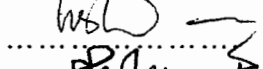

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000 – TAHUN ANGGARAN 2003
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

YOHANES PAULUS T.TUKAN
NIM: 992114160
NIRM: 990051121303120160

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal 28 September 2005
Dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Yusef Widya Karsanō, M.Si., Akt.	
Sekretaris	Fr. Reni Retno Anggraeni, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.	
Anggota	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	Lilis Setiawati, S.E., M.Si., Akt.	

Yogyakarta, 30 September 2005

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Alex Kahu Lantum, M.S

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Aku peroleh kekuatan, keberanian dan rasa percaya diri dari setiap pengalaman yang membuatku berhenti sejenak untuk menghadapi rasa takutku, Aku dapat berkata pada diriku sendiri “ Aku telah menghadapi kengerian ini, Aku pasti mampu menghadapi segala hal berikutnya.....”
(Eleanor Roosevelt)

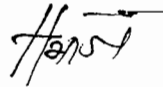
*Kupersembahkan Kepada:
Tuhan Yesus Sebagai Penolongku
Bunda Maria Yang Selalu Menjaga Dan Melindungiku
Almahrama Ibuku Tercinta
Bapak Gaspar Dan Mama Lusia Yang Selalu Memberikan Doa ,
Cinta Dan Kasih Sayang Selama Ini*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 19 Oktober 2005

Penulis



Yohanes Paulus T. Tukan

ABSTRAK

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2000 - TAHUN ANGGARAN 2003

Studi Kasus pada Kabupaten Flores Timur

**Yohanes Paulus T. Tukan
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta 2005**

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui tingkat kemandirian Kabupaten Flores Timur selama tahun anggaran 2000 - 2003, 2) Untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD selama tahun anggaran 2000 - 2003 di Kabupaten Flores Timur, 3) Untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD selama tahun anggaran 2000 - 2003 di Kabupaten Flores Timur, 4) Untuk mengetahui pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran selama tahun anggaran 2000 - 2003 di Kabupaten Flores Timur

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tingkat kemandirian Kabupaten Flores Timur masih sangat rendah dengan rata-rata sebesar 2,70 % untuk setiap tahun anggaran dan mengalami pertumbuhan secara negatif sebesar 0,11 % per tahun. Jadi dapat dikatakan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Flores Timur masih sangat bergantung pada pemerintah yang lebih tinggi 2) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam merealisasikan PAD di nilai kurang efektif dan cenderung menurun, ini dapat dilihat dari rasio efektivitas yang dihasilkan hanya sebesar 78,55 % dan setiap tahun mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,19 %. 3) Secara umum dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam melakukan pemungutan PAD telah efisien dan dari tahun ke tahun cenderung semakin baik. Hal ini dapat di lihat dari rata-rata rasio efisiensi sebesar 2,88 % dan mengalami kenaikan sebesar 0,19 % setiap tahunnya. 4) Realisasi APBD selama tahun anggaran 2000 - 2003 mengalami pertumbuhan positif dan cenderung meningkat, hanya saja tingkat pertumbuhannya tidak stabil.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF REGIONAL'S FINANCIAL RATIO ON THE DISTRICT'S BUDGET OF FLORES TIMUR REGENCY DURING THE FISCAL YEAR OF 2000-2003

A Case Study on Flores Timur Regency

**Yohanes Paulus T. Tukan
Sanata Dharma University
Yogyakarta 2005**

The purposes of this research were: 1) To discover the level of autonomy of Flores Timur Regency during the fiscal year of 2000 - 2003, 2) To discover how far the district government could realize the district's original revenue during the fiscal year of 2000 - 2003 in Flores Timur Regency, 3) To evaluate the district government's performance in executing district's original revenue collection during the fiscal year of 2000-2003 in Flores Timur Regency, 4) To evaluate the development of income and expenditures during the fiscal year of 2000-2003 in Flores Timur Regency.

The data collection technique used were documentation and interview, while the data analysis used was quantitative analysis.

The result of the research showed that: 1) The level of autonomy of Flores Timur Regency was still low indicated by the average at 2,70 % for every year, and this regency had experienced negative growth as much as 0,11 % per year. Therefore, it could be said that Flores Timur Regency has still heavily depended on the higher government; 2) The ability of Flores Timur Regency government in realizing the district's original revenue hasn't been quite effective and it tend to decrease. It could be seen from the effectivity ratio yielded as much as 78,55 %, and every year, it had experienced negative growth by 4,19 %; 3) In general, Flores Timur Regency's performance in executing district's original revenue collection had been efficient and tend to be better every year. It was indicated by the average efficiency ratio per year as much as 2,88 % and every year, the ratio increased by 0,19 %; 4) The District's original revenue realization in Flores Timur Regency during the fiscal year of 2000 - 2003 had experienced positive growth and tend to increase, but the growth was not stable.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma.

Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

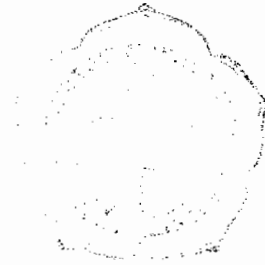
1. Bapak Drs. Alex Kahu Lantun M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
2. Bapak Ir.Drs.Hansiadi YH., M.Si., Akt.,selaku Kaprodi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
3. Ibu Firma Sulistiyowati, S.E.,M.Si., selaku dosen pembimbing I. Terima kasih atas waktu, saran dan masukan serta dukungan bagi saya.
4. Bapak A. Diksa Kuntara, S.E., selaku dosen Pembimbing II . Terima kasih atas masukan yang diberikan sehingga bisa menyempurnakan skripsi ini.
5. Ibu Lisia Apriani, S.E.,M.Si., Akt dan Ibu Lilis Setiawati, S.E.,M.Si.,Akt., selaku dosen penguji terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan.
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Sanata Dharma yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
7. Kepala kantor keuangan Kabupaten Flores Timur yang telah memberikan bantuan kepada penulis saat melakukan penelitian.
8. JQ Kerans yang banyak sekali membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Adikku Hermin, Vera, In yang selalu memberikan doa dan dukungan bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini

10. Inda Bethan yang selalu sabar memberi dorongan bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Merpati 374: Okta, Ferdi, K' Heri, Alm. Juvent, Toni, Lius, Lament, Rollik, Elson, dan masih banyak yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
12. Teman-teman SAMGONG dan TJ; Menue, Juani, Engki Kefa, Ardi Bama, Heri, Ajad, Thomson. " Kora semua noka"
13. Ana-ana Nagi: Romeo, Pa Sil, Pa No, Alm. Ipe Riberu, Pa Toni, No Ermol, No Tan, Iti Uran, Oncu, Djorgy, Siu dan masih banyak yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaan torang selama ini.
14. Buat: Enga, Iwan Assan, Hani Balun, Benny Kleden, Kaliktus Larantukan, Mas Lud, Ati, Leti., Terima kasih atas bantuannya selama ini.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung, yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi inimasih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangannya, karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini berguina bagi semua pihak.

Yogyakarta, 19 Oktober 2005

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian Karya	v
Abstrak	vi
<i>Abstract</i>	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Grafik	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Good Governance</i>	9
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	9
2. Karakteristik <i>Good Governance</i>	10
B. Keuangan Daerah	12
1. Pengertian Keuangan Daerah	12
2. Pengelolaan Keuangan daerah.....	13
2.1 Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah	13
2.2 Karakteristik Pengelolaan Keuangan Daerah.....	14
2.3 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah	16
2.4 Unsur Utama Pengelolaan Keuangan Daerah	17

C.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	18
1.	Pengertian APBD	18
2.	Karakteristik APBD	19
3.	Fungsi APBD	21
D.	Analisis Rasio Keuangan pada APBD	22
1.	Rasio Kemandirian	24
2.	Rasio Efektivitas.....	24
3.	Rasio Efisiensi.....	25
4.	Rasio Pertumbuhan.....	25
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian.....	26
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	26
C.	Subjek dan Objek Penelitian	26
D.	Data yang Dicari.....	26
E.	Teknik Pengumpulan Data	27
F.	Teknik Analisis Data	27
BAB IV	GAMBARAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR	
A.	Keadaan Geografi.....	33
B.	Penduduk dan Tenaga Kerja.....	34
1.	Penduduk	34
2.	Tenaga Kerja	36
C.	Sosial	36
1.	Pendidikan.....	36
2.	Kesehatan	37
3.	Agama	38
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
1.	Perkembangan Keuangan Daerah Ditinjau dari Tingkat Kemandirian	39
A.	Tingkat kemandirian.....	39
B.	Perkembangan Tingkat Kemandirian Kabupaten Flores Timur.....	57

2. Perkembangan Keuangan Daerah Ditinjau dari Rasio Efektivitas Pemungutan PAD.....	60
A. Analisis Rasio Efektivitas	60
B. Perkembangan Rasio Efektivitas Pemungutan PAD.....	64
3. Perkembangan Keuangan Daerah Ditinjau dari Rasio Efisiensi Pemungutan PAD	67
A. Analisis Rasio Efisiensi.....	67
B. Perkembangan Rasio Efisiensi Pemungutan PAD	68
4. Perkembangan Keuangan Daerah Ditinjau dari Pertumbuhan Pertumbuhar Komponen APBD	71

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Keterbatasan	78
C. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
IV.1 Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten Flores Timur ...	33
IV.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Flores Timur	35
IV.3 Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Flores Timur Menurut Status Pekerjaan Utama.....	36
IV.4 Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Flores Timur.....	37
V.1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2000 – 2003	40
V.2 Kemandirian Realisasi Daerah Flores Timur	41
V.3 Total Penerimaan Pos PAD Tahun Anggaran 2000	45
V.4 Total Penerimaan Pos-pos Pajak daerah Tahun Anggaran 2000	46
V.5 Total Penerimaan Pos Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2000.....	46
V.6 Total Penerimaan Pos Lain-lain Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2000	47
V.7 Total Penerimaan Pos PAD Tahun Anggaran 2001	48
V.8 Total Penerimaan Pos pajak Daerah Tahun Anggaran 2001	49
V.9 Total Penerimaan Pos Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2001	50
V.10 Total Penerimaan Pos Lain-lain Pendapatan tahun Anggaran 2001	51
V.11 Total Penerimaan Pos Laba Usaha Daerah Tahun Anggaran 2001	51
V.12 Total Penerimaan Pos Pajak Daerah Tahun Anggaran 2002	53
V.13 Total Penerimaan Pos Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2002.....	54
V.14 Total Penerimaan Pos Lain-lain Pendapatan Tahun Anggaran 2002.....	55
V.15 Total Penerimaan Pos Laba Usaha Daera Tahun Anggaran 2002	55
V.16 Trend Tingkat Kemandirian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2000 – 2003	58
V.17 Rasio Efektivitas Pemungutan PAD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2000 – 2003	61
V.18 Trend Rasio Efektivitas Pemungutan PAD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2000 – 2003	65

V.19 Rasio Efisiensi Pemungutan PAD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2000 – 2003	67
V.20 Trend Rasio Efisiensi Pemungutan PAD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2000 – 2003	69
V.21 Rasio Pertumbuhan Realisasi APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2000 – 2003	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Hal
V.1 Trend Tingkat Kemandirian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2000 – 2003	59
V.2 Trend Rasio Efektivitas Pemungutan PAD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2000 – 2003	66
V.3 Trend Rasio Efisiensi Pemungutan PAD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2000 – 2003	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi pembangunan suatu bangsa tidak akan berjalan dengan cepat dan merata bila pelaksanaan pembangunan daerah selalu ditentukan oleh pemerintah pusat. Daerah harus memiliki kemandirian dan inisiatif bagi kemajuan pembangunan daerahnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah (Yenni, 2000:15). Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan.

Pemerintah daerah merupakan salah satu pelaku pokok terpenting dalam upaya pengembangan potensi ekonomi daerah. Sesuai pasal 18 UUD 1945, baik Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Pemerintah Daerah Propinsi diberi hak otonomi untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri-sendiri sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Dengan

demikian pemerintah daerah diberi kebebasan menentukan prioritas pembangunan daerah selama tetap memperhatikan keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Radianto, 1997:44).

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Penyelenggaraan tugas-tugas di daerah semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan daerah. Agar dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka daerah perlu memiliki sumber pembiayaan yang cukup, oleh karena itu tidak semua sumber-sumber pembiayaan diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan kebijakan pemerintah daerah harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada

prinsip-prinsip anggaran sehingga program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD dapat dilaksanakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Sesuai dengan prinsip anggaran yang bersifat komprehensif maka APBD harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada suatu tahun anggaran tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat untuk suatu tahun anggaran tertentu.

Dengan demikian APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada suatu tahun anggaran.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Sr. Ruslina Nadeak pada tahun 2003 melakukan penelitian dengan judul "Analisis Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah, Studi Kasus Pada Pemerintah

Daerah Maluku Tenggara selama tahun anggaran 1998 sampai tahun anggaran 2002. Dari penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa 1) Tingkat kemandirian daerah kabupaten Maluku Tenggara masih sangat rendah dengan rata-rata rasio kemandirian sebesar 2,93 % per tahun dengan peningkatan tiap tahun sebesar 0,42 %. 2) Rasio efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Tenggara cenderung tidak efektif, karena rasio efektivitas yang dihasilkan kurang dari 100 % yakni sebesar 89,59 %. 3) Pemungutan pendapatan asli daerah di Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun ke tahun semakin efisien dengan rata-rata rasio efisien sebesar 3,27 %.

Daerah tempat yang akan diteliti adalah Kabupaten Flores Timur, di mana Flores Timur merupakan salah satu dari sekian kabupaten yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini difokuskan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu empat tahun anggaran yakni tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2003. Sebagai tambahan bahwa mulai tahun 2000, tahun anggaran dihitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi masalah pada Analisis Rasio Kemandirian (*otonomi fiskal*), Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Seberapa besar kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2000 – Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Flores Timur?
2. Bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah selama Tahun Anggaran 2000 – Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Flores Timur?
3. Bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah selama Tahun Anggaran 2000 – Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Flores Timur?
4. Bagaimana pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2000 – Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Flores Timur?.

D. Tujuan Penelitian

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2000 – Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Flores Timur.

2. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah selama Tahun Anggaran 2000 – Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Flores Timur.
3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah selama Tahun Anggaran 2000 – Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Flores Timur.
4. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2000 - Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Flores Timur.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan keuangan dalam APBD, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang Keuangan Daerah.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh kedalam praktek yang sesungguhnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendukung permasalahan dan pembahasan dari hasil studi pustaka.

Uraian yang terdapat pada bab ini nanti akan dijadikan sebagai landasan berpikir bagi penulis dalam mengelola data yang diperoleh, dan menganalisa permasalahan untuk mendapatkan pemecahan atas permasalahan yang diajukan.

BAB III : Metodologi Penelitian

Didalam bab ini diuraikan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data-data yang dicari selama penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran umum Daerah Kabupaten Flores Timur

Pada bab ini akan menguraikan secara singkat mengenai gambaran umum pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB V : Analisis data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data serta pembahasan.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran yang diambil dan dibuat peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Good Governance

Good governance merupakan paradigma yang dikembangkan oleh *World Bank*, *United Nation Development Programme (UNDP)* dan *Asia Development Bank (ADB)* yang menegaskan pentingnya kesejajaran dan keharmonisan antara tiga elemen kunci negara: pemerintah (*government*), pasar (*business*), dan masyarakat (*civil society*). Sebab hanya dengan demikian terwujudlah negara yang bersih dan responsive (*clean and responsive state*), berkembangnya masyarakat madani (*vibrant civil society*) dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (*good corporate governance*) bukan sekedar impian lagi. Untuk itu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial dan politik (Budisantosa, 2001; Susilo, 2001).

1. Pengertian *Good Governance*

Menurut Mardiasmo pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik (Mardiasmo, 2002:17).

World Bank memberi defenisi sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sementara itu *United Nation Development Programme (UNDP)* mendefenisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all level*”. Dalam hal ini *World Bank* menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya

sosial ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan keuangan negara.

Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2. Karakteristik *Good Governance* menurut UNDP

UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

- a) *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b) *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c) *Transparence*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. *Responsiveness*. Lembaga – lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

- d) *Responsiveness*. Lembaga – lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e) *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f) *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g) *Efficiency and effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)
- h) *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i) *Strategic vision*. Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*publik management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenaan seluruh alat-alat pemerintahan daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*). (Mardiasmo, 2002:20)

B. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai⁴ semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku⁵ (Mamesah: 1995).

Dari defenisi tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu:

- a) Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan.
- b) Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembananagan ekonomi.

Sebagaimana keuangan negara, keuangan daerah juga memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Negara.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang terkait satu dengan lainnya. Ketiga aspek tersebut meliputi:

- a) Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
- b) Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
- c) Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Hasil analisis pendapatan dan pengeluaran merupakan komponen dalam menganalisis keuangan daerah. Jika pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran, akan terjadi surplus anggaran dan jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan akan terjadi defisit anggaran.

2.1. Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam konsep yang lebih luas, Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari aspek-aspek berikut:

- a) Pengelolaan (optimalisasi dan /atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin dilakukan.
- b) Ditetapkan oleh Badan Eksekutif dan Badan Legislatif, dilaksanakan oleh Badan Eksekutif, serta diawasi oleh Badan Legislatif dan seluruh komponen masyarakat Daerah.
- c) Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
- d) Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
- e) Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas.

Obyek pengelolaan keuangan daerah adalah sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.

Pada sisi penerimaan, daerah dapat melakukan dua hal: *pertama*, mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMD. *Kedua*, Daerah dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, daerah harus dapat melakukan redefinisi proses penganggaran.

2.2. Karakteristik Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun cirri-ciri utama pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah

a. Sederhana

Maksudnya, system yang sederhana lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh mereka yang bertugas menjalankannya, dan lebih besar kemungkinan diikuti tanpa salah, dapat lebih cepat memberikan hasil dan mudah diperiksa. Karena itu, tujuan praktis yang hendak dicapai dalam menyusun suatu pengelolaan keuangan salah satunya adalah menciptakan tata cara yang sederhana sejalan dengan hasil atau tujuan yang hendak dicapai.

b. Lengkap

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan hendaknya dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan, dan harus mencakup segi keuangan setiap keuangan daerah, jadi kegiatan menyusun anggaran harus menegakkan keabsahan penerimaan dan pengeluaran.

c. Berhasil guna

Artinya, pengelolaan keuangan daerah bersangkutan dalam kenyataan harus dapat mencapai tujuan-tujuan yang bersangkutan.

d. Berdaya guna

Dalam hal ini, daya guna memiliki dua segi yaitu pertama, daya guna melekat pengelolaan keuangan bersangkutan harus dinaikkan setinggi-tingginya, artinya hasil yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan biaya serendah-rendahnya, dari sudut jumlah petugas dan dana yang dibutuhkan atau hasil yang dicapai harus

sebesar-besarnya. Kedua, pengelolaan keuangan yang bersangkutan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memperbesar daya guna yang menjadi alat pemerintah daerah untuk menjalani kegiatan-kegiatannya itu dan tidak menghambatnya.

e. Mudah disesuaikan

Maksudnya, pengelolaan keuangan jangan dibuat demikian kaku hingga sulit menerapkannya atau menyesuaikannya pada keadaan yang berbeda-beda.

2.3. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Halim, 2001: 88):

a. Tanggung jawab

Artinya, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Artinya, keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang.

c. Kejujuran

Artinya, urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.

d. Hasil guna dan kegiatan bunga

Artinya, tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

e. Pengendalian

Artinya, petugas keuangan pemerintah daerah, DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai.

2.4. Unsur Utama Pengelolaan Keuangan Daerah

Unsur-unsur sistem keuangan pemerintah daerah dapat digolongkan dalam dua kelompok (Halim, 2001: 89):

a. Unsur berkala dan unsur hukum

Unsur berkala mencakup unsure-unsur yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan berkala dalam setahun, yakni menyusun program dan anggaran, pengeluaran dan penerimaan anggaran. Unsur hukum mencakup unsure-unsur pengaturan dan pemantauan kegiatan berkala yakni undang-undang dan peraturan keuangan.

b. Unsur-unsur⁶ luar dan dalam

Unsur luar meliputi pengawasan yang dikenakan terhadap pemerintah daerah oleh pejabat-pejabat pengawas yang lebih tinggi (pemerintah pusat dan dan terhadap Dati II oleh Gubernur Propinsi). Adapun unsure dari dalam adalah unsure pengawasan dan pelaporan yang diadakan dan dilakukan oleh pemerintah daerah bagi pedoman para pejabat keuangan Pemerintah Daerah.

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cermin dari pilihan-pilihan ekonomis dan sosial masyarakat suatu daerah. Untuk menjalankan peran yang dimandatkan masyarakat untuk melakukan pilihan-pilihan tersebut, Pemerintah Daerah harus melaksanakan fungsi *pertama*, pengumpulan sumber daya yang mencukupi dengan cara yang tepat, dan, *kedua* pengalokasian dan penggunaan sumber daya tersebut secara responsive, efisien dan efektif. Fungsi pertama berkaitan dengan sisi penerimaan (pendapatan) dari APBD sedang fungsi kedua dari sisi pengeluaran (belanja).

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah Suatu

rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Mamesah, (1995: 20) adalah:

Rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaandaerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Defenisit tersebut mengandung unsur sebagai berikut (Mamesah,1995:20-21)

1. Rencana operasional daerah, yang menggambarkan adanya adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan dimana aktivitas tersebut telah diuraikan secara rinci.
 2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut sedang biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan akan dilaksanakan.
 3. Dituangkan dalam bentuk angka, jenis kegiatan dan jenis proyek.
 4. Dibuat untuk keperluan satu tahun anggaran.
2. Karakteristik APBD

Karakteristik APBD di era Prareformasi (Halim,2002: 17) adalah antarlain:

1. APBD disusun oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah (pasal 30 UU No.5/1975).
2. Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah line item atau pendekatan tradisional.
3. Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pemeriksaan, dan penyusunan dan penetapan perhitungan APBD.
4. Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap penyusunan dan penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan /audit terhadap APBD bersifat keuangan.
5. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap tiga unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan hasil program (untuk proyek-proyek daerah).
6. Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan *stelsel kameral* (tata buku anggaran). Menurut sistem pembukuan ini, penyusunan anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Di era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan cukup mendasar. Bentuk APBD yang baru didasarkan pada peraturan-peraturan mengenai otonomi daerah terutama UU No. 22/1999, UU No.25/1999, PP No. 105/2000, dan PP No. 108/2000. Akan tetapi, karena untuk menerapkan peraturan yang baru diperlukan proses, maka untuk menjabatani pelaksanaan keuangan daerah pada kedua era tersebut dikeluarkan peraturan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

No. 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001.

Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mengakomodasi transisi dari UU No.05/1974 ke UU No. 02/ 1999.

Peraturan peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu dalam bentuk yang baru APBD diperkirakan akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era prareformasi.

3. Fungsi APBD

Fungsi dari APBD adalah (Mamesah, 1995: 18)

- a) Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.
- b) Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- c) Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah.
- d) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- e) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah di dalam batas-batas tertentu.

Begitu pentingnya APBD tersebut sehingga penyusunannya harus dilakukan dan dipertimbangkan dengan baik dan saksama dengan memperhatikan skala prioritas, serta dalam pelaksanaannya harus terarah dan terkendali sesuai sarannya sehingga benar-benar berdaya guna dan berhasil guna.

D. Analisis Rasio Keuangan Pada APBD

Analisis Rasio adalah (Munawir, 1999: 37)

Suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individual atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

Menurut Munawir (1999: 64) rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada analisa tentang baik atau buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan rasio rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

Pada dasarnya macam-macam rasio keuangan itu banyak sekali karena rasio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisa. Apabila dilihat dari sumbernya rasio dibuat maka rasio dapat digolongkan menjadi tiga golongan (Riyanto, 1998: 330)

1. Rasio-rasio neraca (*Balance Sheet Ratio*) adalah rasio-rasio yang disusun dari data dalam neraca.

2. Rasio-rasio Laba Rugi (*Income Statement Ratio*) adalah rasio-rasio yang disusun dari data-data dalam laporan laba rugi.
3. Rasio-rasio Antar Laporan (*Intern Statement Ratio*) adalah rasio-rasio dari data-data yang berasal dari neraca dan data lainnya berasal dari laporan laba rugi.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut pemerintah daerah lainnya.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah:

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah Pusat/Propinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan Kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain Rasio Kemandirian (otonomi fiskal), Rasio efektivitas, Rasio efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan (Halim, 2002:128).

1. Rasio Kemandirian

Menurut Abdul Halim kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Upaya nyata didalam mengukur tingkat kemandirian yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi PAD dengan total realisasi pendapatan daerah (Halim, 2002:198)

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:129).



3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah yang diterima (Halim, 2002: 130)

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2002:135)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah studi kasus, dimana penelitian dilakukan terhadap obyek tertentu. Adapun hasil yang diperoleh dari analisa hanya berlaku untuk obyek tertentu dan dalam waktu tertentu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian : Penelitian dilakukan di Kabupaten Flores Timur.
2. Waktu Penelitian : Tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 18 Desember 2004

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek penelitiannya adalah Dinas Pendapatan dan Anggaran Daerah dan Bagian Keuangan Kabupaten Flores Timur.
2. Obyek penelitiannya adalah Pendapatan Asli Daerah dan data APBD Tahun Anggaran 2000 – Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Flores Timur.

D. Data yang dicari

1. Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Flores Timur
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran tahun anggaran 2003.
3. Target Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2003

4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2003.
5. Biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2000 sampai tahun anggaran 2003.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan penelitian.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan APBD Tahun Anggaran 2000 – Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Flores Timur.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang pertama mengenai seberapa besar kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan selama tahun anggaran 2000 - 2003, penulis menggunakan dua langkah yaitu:

1. Menghitung Tingkat kemandirian (Halim, 2002: 128)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi resiko kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun kriteria penilaian tingkat kemandirian (Halim, 2001: 162):

- 1) Apabila tingkat kemandirian 0% - 25% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali, maka daerah tersebut sangat tergantung pada pemerintah pusat yang berarti tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 2) Apabila tingkat kemandirian 25 % - 50% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah, namun campur tangan pusat mulai berkurang dengan demikian dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Apabila tingkat kemandirian 50% -75% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang, dengan demikian daerah

yang bersangkutan mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

4) Apabila tingkat kemandirian 75% - 100 berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi, maka campur tangan pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri melaksanakan otonomi daerah.

2. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemandirian digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend.

Dengan Rumus: $Y' = a + bx$ dimana,

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan:

Y = Variabel tingkat kemandirian.

a = Besarnya Y saat x = 0

b = besarnya perubahan Y jika x mengalami perubahan 1 satuan

x = Waktu

Untuk menjawab permasalahan kedua mengenai bagaimana kemampuan pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2000 – 2003, penulis menggunakan dua langkah yaitu:

1. Menghitung Rasio Efektivitas (Halim, 2002: 129)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

2. Untuk mengetahui perkembangan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah ditinjau dari Rasio efektivitas tersebut digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend.

Dengan Rumus: $Y' = a + bx$ dimana,

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan:

Y = Variabel Rasio Efektivitas .

a = Besarnya Y saat x = 0

b = besarnya perubahan Y jika x mengalami perubahan 1 satuan

x = Waktu

Untuk menjawab permasalahan ketiga mengenai bagaimana kinerja pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2000 - 2003, penulis menggunakan dua langkah yaitu:

1. Menghitung Rasio Efisiensi (Halim, 2002: 130)

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Halim, 2002: 130)

2. Untuk mengetahui perkembangan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah dilihat dari Rasio efisiensi digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend.

Dengan Rumus: $Y' = a + bx$ dimana,

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan:

Y = Variabel Rasio Efisiensi .

a = Besarnya Y saat x = 0

b = besarnya perubahan Y jika x mengalami perubahan 1 satuan

x = Waktu

Untuk menjawab permasalahan keempat mengenai bagaimana pertumbuhan/ perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran selama tahun anggaran 2000 – 2003 di Kabupaten Flores Timur, digunakan rumus:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

dimana: P_n = data pada tahun ke-n (tahun sekarang)

P_o = data pada tahun ke-o (tahun sebelumnya)

r = pertumbuhan

Untuk dapat mengetahui pertumbuhan dari masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran adalah dengan mengurangkan hasil yang dicapai pada tahun anggaran sekarang dengan hasil yang dicapai pada tahun sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada tahun sebelumnya (Halim, 2002: 135). Apabila r bernilai positif berarti komponen APBD mengalami pertumbuhan yang bagus atau terjadinya peningkatan pertumbuhan pada komponen APBD dan sebaliknya apabila r bernilai negatif berarti terjadinya penurunan tingkat pertumbuhan pada komponen APBD.

BAB IV
GAMBARAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

A. Keadaan Geografi

Kabupaten Flores Timur merupakan kabupaten yang termasuk dalam wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Flores Timur terletak diantara 80,04 sampai 80,40 Lintang Selatan dan 1.230,57 sampai 1.220,38 Bujur Timur. Secara geografis, letaknya berbatasan antara lain dengan Laut Flores sebelah utara dan Laut Sawu di sebelah selatan, Kabupaten Lembata di sebelah timur dan Kabupaten Sikka di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Flores Timur kira-kira 1.812,85 Km²

Tabel IV.1
Luas kecamatan dan % terhadap Luas
Kabupaten Flores Timur
2003

	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1	Wulan Gitang	304,49	16,80
2	Titehena	211,70	11,68
3	Tanjung Bunga	343,16	18,93
4	Ile Mandiri	74,24	4,09
5	Larantuka	133,28	7,35

6	Solor Barat	150,68	8,31
7	Solor Timur	75,66	4,17
8	Wotan Ulu Mado	75,81	4,18
9	Adonara Barat	113,96	6,29
10	Adonara Timur	108,94	6,01
11	Ile Boleng	51,39	2,83
12	Witihama	77,97	4,30
13	Kelubagolit	91,57	5,05
Jumlah		1.812,85	100,00

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur

B. Penduduk dan Tenaga Kerja

1. Penduduk

Penduduk merupakan faktor penting dalam perkembangan suatu daerah atau wilayah, karena faktor ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi terjadinya aktivitas di suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan nasional jika penduduk tersebut mempunyai kualitas yang baik.

Berdasarkan sensus penduduk yang diadakan pada tahun 2003, jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur adalah 215.876 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 119 jiwa/Km².

Tabel IV. 2
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Flores Timur
2003

	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Per Km ²
1	Wulan Gitang	304,49	18.285	60
2	Titehena	211,70	10.461	49
3	Tanjung Bunga	343,16	18.048	53
4	Ile Mandiri	74,24	9.091	112
5	Larantuka	133,28	34.225	257
6	Solor Barat	150,68	12.467	83
7	Solor Timur	75,66	14.319	189
8	Wotan Ulu Mado	75,81	7.434	98
9	Adonara Barat	113,96	20.591	181
10	Adonara Timur	108,94	24.077	221
11	Ile Boleng	51,39	13.402	261
12	Witihama	77,97	14.102	181
13	Kelubagolit	91,57	19.374	212
	Jumlah	1.812,85	215.876	119

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur

2. Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas tenaga kerja tahun 2003 sebesar 160.642 orang yang terdiri dari 102.788 orang angkatan kerja dan 57.854 orang bukan angkatan kerja.

Tabel IV. 3
Penduduk yang Bekerja
di Kabupaten Flores Timur
Menurut Status Pekerjaan Utama
2003

Status Pekerjaan Utama	Banyaknya (orang)
1 Berusaha Sendiri	17.621
2 Berusaha dibantu Buruh / Pekerja tidak tetap / Pekerja tidak dibayar	26.326
3 Berusaha dengan Buruh tetap	1.095
4 Buruh / Karyawan	12.967
5 Pekerja Bebas Pertanian	3.803
6 Pekerja Bebas Non Pertanian	687
7 Pekerja Keluarga / tidak dibayar	31.869
Jumlah	94.368

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur

C. Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai. Semakin

maju pendidikan berarti akan membawa pengaruh positif bagi berbagai bidang kehidupan. Secara umum perkembangan pendidikan di Kabupaten Flores Timur mengalami kemajuan.

Tabel IV. 4
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid
Serta Rata-Rata Guru dan Murid per Sekolah
Di Kabupaten Flores Timur
Menurut Tingkat Sekolah
2003

	Tingkat Sekolah	Banyaknya			Rata-rata	Rata-rata
		Sekolah	Guru	Murid	Guru Per Sekolah	Murid Per Sekolah
1	SD	256	2.083	33.091	8.31	129.60
2	SMTP Umum /	44	640	8.564	14.54	194.75
	SMP	44	640	8.564	14.54	194.75
3	SMTA Umum /	14	186	3.602	20.42	257.28
	SMA	14	186	3.602	20.42	257.28
4	SMTA	4	117	1.835	29.25	458.75
	Kejuruan /	2	46	900	23.00	450.00
	SMEA / STM	2	71	935	35.5	467.50

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur

2. Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu di Kabupaten Flores Timur pelayanan kesehatan dilaksanakan terpadu dan menyeluruh dengan dibangunnya puskesmas-puskesmas di setiap kecamatan maupun di desa-desa serta penempatan atau penyediaan tenaga-tenaga medis.

Kabupaten Flores Timur memiliki tiga (3) buah rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Kabupaten Flores Timur dan Rumah Sakit Swasta milik Susteran PRR yang berlokasi di kota Larantuka serta Rumah Sakit Swasta milik Susteran CB yang berlokasi di kecamatan Witihama. Sedangkan jumlah puskesmas 14 unit dan Puskesmas Pembantu 43 unit yang tersebar di setiap kota kecamatan.

3. Agama

Mayoritas Penduduk Kabupaten Flores Timur beragama Katholik. Ini disebabkan oleh penyebaran agama Katholik yang dilakukan oleh bangsa Portugis di masa lampau. Kenyataan ini dibuktikan dengan banyaknya kebudayaan dan ritual keagamaan yang berasal dari portugis yang sampai dengan saat ini masih melekat dan banyak digunakan oleh masyarakat; seperti penggunaan gelar raja, ritual Prosesi (Jalan Salib) dan banyaknya bahasa Portugis yang diserap menjadi bahasa setempat. Islam, Protestan, Hindu dan Budha menjadi agama minoritas dengan persentase akumulatif sebesar 15%

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Keuangan Daerah Ditinjau dari Tingkat Kemandirian.

A. Tingkat Kemandirian

Tingkat kemandirian suatu daerah dalam hal ini Kabupaten Flores Timur mencerminkan seberapa besar daerah tersebut mampu melepaskan diri secara keuangan dari pemerintah yang lebih tinggi. Semakin tinggi persentase tingkat kemandirian berarti makin rendah atau menurunnya ketergantungan keuangan daerah dari pemerintah yang lebih tinggi, sebaliknya, makin kecil tingkat kemandirian maka makin tinggi ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah atau instansi yang lebih tinggi. Tingkat kemandirian menggambarkan juga tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya. Semakin tinggi tingkat kemandirian menunjukkan makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang merupakan dua komponen utama pendapatan asli daerah. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dihitung dengan membandingkan besarnya realisasi pendapatan asli daerah dengan total penerimaan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran.

Tabel V.1 akan menyajikan data tentang perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur

dalam kurun waktu empat tahun anggaran dimulai dari tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2003 yang akan digunakan sebagai data pokok dalam perhitungan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Flores Timur dan tabel V.2 akan menyajikan data tingkat kemandirian daerah dalam kurun waktu empat tahun anggaran tersebut setelah dilakukan perhitungan.

Tabel V.1
Perkembangan Realisasi APBD Kab Flores Timur
Tahun Anggaran 2000 - Tahun Anggaran 2003
(dalam Rp.000)

No	Penerimaan	2000	2001	2002	2003
1	Sisa Peng Tahun Lalu	3.011.454	2.151.115	6.741.282	-
2	Pendapatan Asli Daerah	1.667.790	3.253.213	3.589.396	4.810.386
3	Bagi Hsl Pajak/bkn Pajak	3.808.785	6.377.659	6.768.588	9.761.740
4	Subsidi Otonomi Daerah	30.530.056	-	-	-
5	DAU/DAK	10.055.782	116.873.472	135.258.950	153.090.000
6	Pinjaman	-	-	-	-
7	Penghasilan lain yang sah	-	3.979.913	4.319.012	10.447.147
	Jumlah	49.073.868	132.635.374	156.677.230	178.109.274
	Belanja				

1	Belanja Rutin	34.374.633	84.358.868	105.463.373	66.648.110
2	Belanja publik/Pemb	12.548.119	41.535.224	43.914.483	107.542.106
3	Sisa Penghasilan tahun ini	2.151.115	6.741.282	7.299.373	3.919.058
	Jumlah	49.073.868	132.635.374	156.677.230	178.109.274

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)

Tabel V.2

Kemandirian Daerah Kabupaten Flores Timur

(dalam Rp.000)

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan	Tingkat Kemandirian
2000	1.667.790	49.073.868	3.39 %
2001	3.253.213	132.635.374	2.45 %
2002	3.589.396	156.677.230	2.29 %
2003	4.810.386	178.109.274	2.70 %

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)

Jika kita melihat kemampuan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan otonomi daerah, secara objektif tabel di atas menggambarkan dengan jelas bahwa bantuan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi sangat dominan. Dari data setiap tahun anggaran, pemerintah pusat dan pemerintah propinsi sangat dominan dalam menyokong bantuan finansial terhadap penyelenggaraan pembangunan pada

kabupaten Flores timur, atau dapat kita katakan bahwa APBD Kabupaten Flores Timur secara mutlak berasal dari pemerintah yang lebih tinggi. Dalam empat tahun anggaran terakhir proporsi bantuan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi hampir mencapai 97 % dari total anggaran yang ditetapkan. Kemampuan daerah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah masih rendah dan jauh dari harapan. Beberapa faktor utama yang menjadi kendala kecilnya pendapatan asli daerah di kabupaten Flores Timur, antara lain :

- 1) Minimnya sumber daya alam yang secara potensial memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Keadaan ini didukung oleh kondisi alam yang tandus dan gersang.
- 2) Hampir 2/3 penduduk kabupaten Flores Timur berada di bawah garis kemiskinan yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sektor swasta.
- 3) Banyaknya penduduk usia produktif yang meninggalkan daerah untuk memperbaiki taraf hidup.
- 4) Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi masih rendah sehingga realisasi penerimaan pajak dan retribusi masih jauh dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak pada keempat tahun anggaran yang dijadikan sampel penelitian masih di bawah target yang ditetapkan. Data dari tabel penerimaan menunjukkan pada tahun anggaran 2000 realisasi penerimaan pajak hanya Rp.377.930.088,99 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.530.055.800,00 sedangkan pada tahun

anggaran 2001 juga terjadi penurunan dalam realisasi penerimaan pajak, dimana total realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp.530.169.749,99 dari target yang ditetapkan sebesar 624.972.000,00. Tahun anggaran 2002 adalah yang terparah, penurunan dalam realisasi penerimaan pajak hampir mencapai 50 % dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan hanya sebesar Rp.394.023.345,06 dari target sebesar Rp.697.810.000,00 dan pada tahun anggaran 2003 terjadi penurunan sebesar 0,87 % dimana realisasi pajak yang mampu dicapai sebesar Rp.633.560.514,47 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.720.299.951,00.

Dari keempat tahun anggaran yang diambil sebagai sampel penelitian, terlihat bahwa pada tahun anggaran 2000, terjadi kenaikan pendapatan asli daerah yang sangat signifikan dari pendapatan asli daerah pada tahun anggaran sebelumnya. Kenaikan pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2001 mencapai 95,06 %. Hal ini menjadi mungkin, karena dengan adanya otonomi daerah, daerah dituntut untuk memaksimalkan potensi daerahnya dan kabupaten Flores Timur membuktikan hal ini. Kenaikan pendapatan asli daerah pada tahun selanjutnya yakni tahun anggaran 2002 hanya sebesar 10,33 %. Ada kesan bahwa kenaikan hanya 10,33 % ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Flores Timur menemui kesulitan melihat celah atau peluang terhadap potensi-potensi daerah yang potensial yang nyata memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun anggaran selanjutnya, yakni tahun anggaran 2003 pendapatan asli daerah Kabupaten Flores Timur hanya

meningkat 34 % dari tahun anggaran sebelumnya. Kenaikan pendapatan asli daerah banyak dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.633.560.514,47 dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp.394.023.345,06.

Selanjutnya akan dibahas dan diuraikan secara komprehensif mengenai sektor-sektor yang berpengaruh terhadap perubahan pendapatan asli daerah pada setiap tahun anggaran.

- 1) Pada tahun anggaran 2000 tingkat kemandirian Kabupaten Flores Timur sebesar 3,39 %. Artinya pendapatan asli daerah hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 3,39 % atau sebesar Rp.1.667.790.610,99 terhadap realisasi total penerimaan. Pada tahun anggaran ini bagian pos laba usaha daerah tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi terbesar dari pendapatan asli daerah adalah lain-lain pendapatan yang sah, kemudian disusul retribusi daerah, dan yang terakhir adalah pajak daerah seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel V.3
Total Penerimaan Pos-Pos PAD
Tahun Anggaran 2000
(dalam Rp)

No	Bagian	Total penerimaan
1	Pajak Daerah	377.930.088,99
2	Retribusi Daerah	608.205.286,00

3	Lain-lain Pendapatan	681.655.236,00
4	Laba Usaha Daerah	-

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)

Deskripsi mengenai ketiga sub bagian pendapatan asli daerah akan dijabarkan masing-masing dalam bentuk tabel dan disertai dengan penjelasan.

a) Pajak Daerah

Seperti yang disajikan pada tabel di bawah (tabel V.4), jenis pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak daerah disusul pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan yang terakhir adalah pajak hiburan.

Tabel V.4
Total Penerimaan pada Pos-Pos Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2000
(dalam Rp)

No	Pos-Pos Pajak Daerah	Penerimaan
1	Pajak Hotel dan Restoran	25.711.555,00
2	Pajak Hiburan	1.200.000,00
3	Pajak Reklame	5.546.865,00
4	Pajak Penerangan Jalan	121.592.730,00
5	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	219.588.938,99
6	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	4.290.000,00

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)

b) Retribusi Daerah

Tabel V.5
Total Penerimaan pada Pos Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2000
(dalam Rp)

No	Pos Retribusi Daerah	Penerimaan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	336.934.446,00
2	Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	44.976.500,00
3	Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	2.000.000,00
4	Retribusi pasar	96.803.200,00
5	Retribusi Terminal	15.443.000,00
6	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	13.509.100,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	21.731.500,00
8	Retribusi IMB	1.422.300,00
9	Retribusi Ijin Trayek	22.615.000,00
10	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	52.770.240,00

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)

c) Lain-Lain Pendapatan

Tabel V.6
Total Penerimaan Pos Lain – Lain Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2000
(dalam Rp)

No	Pos lain-lain Pendapatan	Penerimaan
1	Hasil penjualan barang milik daerah	10.836.500,00
2	Jasa Giro	105.547.500,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga	456.495.420,00
4	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah	2.522.500,00
5	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah	43.587.982,00
6	Lain-Lain Penerimaan	62.665.334,00

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)

- 2) Pada tahun anggaran 2001 tingkat kemandirian Kabupaten Flores Timur menurun bila dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya yang hanya mencapai 2,45 %. Tapi jika diperhatikan bahwa dalam tahun anggaran ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun anggaran ini, kenaikan pendapatan asli daerah hampir mencapai 100 %. Hal ini mencerminkan pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai memaksimalkan segala potensi daerah dan memberdayakan aparatur

daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pos-pos pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yang mengembirakan, yang menarik dalam tahun anggaran ini bahwa pos Perusahaan Milik Daerah telah memberikan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran yang lalu, Perusahaan Milik Daerah ini tidak memberikan masukan terhadap pendapatan asli daerah. Tabel di bawah ini memaparkan penerimaan dari setiap pos-pos pendapatan asli daerah

Tabel V.7
Total Penerimaan Pos- pos PAD
Tahun Anggaran 2001
(dalam Rp)

No	Bagian	Total penerimaan
1	Pajak Daerah	530.169.749,99
2	Retribusi Daerah	1.202.663.505,50
3	Lain-lain Pendapatan	1.392.843.369,75
4	Laba Perusahaan Milik Daerah	127.537.139,00

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)

Dari tabel diatas, dalam tahun anggaran ini penerimaan dari pajak daerah sebesar Rp.530.169.749,99. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, pos pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.152.239.661,00 atau sekitar 40,28 %. Proporsi terbesar dari pajak daerah berasal dari pos pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar Rp.272.533.309,99 dan kontribusi terendah diberikan

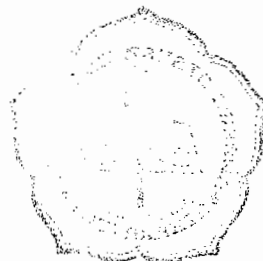
oleh pos pajak hiburan sebesar Rp.3.302.500,00 (lihat tabel V.8). Retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.594.458.219,00. dari tahun anggaran sebelumnya menjadi Rp. 1.202.663.505,50 atau meningkat 97,73 %. Lain- lain Pendapatan meningkat 104,38 % dari tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.681.655.236,00 menjadi Rp.1.392.843.369,75 pada tahun anggaran ini.

a) Pajak Daerah

Tabel V.8
Total Penerimaan pada Pos-Pos Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2001
(dalam Rp)

No	Pos-Pos Pajak Daerah	Penerimaan
1	Pajak Hotel dan Restoran	61.623.130,00
2	Pajak Hiburan	3.302.500,00
3	Pajak Reklame	6.547.475,00
4	Pajak Penerangan Jalan	166.623.335,00
5	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	272.533.309,99
6	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	19.540.000,00

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)



b) Retribusi Daerah

Tabel V.10

**Total Penerimaan pada Pos-Pos Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2001
(dalam Rp)**

No	Pos Retribusi Daerah	Penerimaan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	700.252.463,00
2	Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	70.089.250,00
3	Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	18.600.100,00
4	Retribusi pasar	159.947.915,50
5	Retribusi Terminal	41.312.000,00
6	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	27.977.401,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.660.000,00
8	Retribusi IMB	299.500,00
9	Retribusi Ijin Trayek	22.400.000,00
10	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	52.763.820,00
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	93.361.056,00

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)

Dari tabel di atas terdapat tambahan pada pos retribusi yakni pos retribusi

Pengujian Kendaraan Bermotor.

c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Tabel V.10
Total Penerimaan pada Pos Lain-Lain Pendapatan
Tahun Anggaran 2001

No	Pos lain-lain Pendapatan	Penerimaan
1	Hasil penjualan barang milik daerah	6.813.000,00
2	Jasa Giro	576.884.947,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga	627.819.046,00
4	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah	9.414.960,00
5	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah	2.592.609,75
6	Lain-Lain Penerimaan	169.318.807,00

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)

d) Pos Bagian Laba Usaha Daerah

Tabel V.11
Total Penerimaan pada Pos Bagian Laba Usaha Daerah
Tahun Anggaran 2001
(dalam Rp)

No	Pos Bagian Laba Usaha Daerah	Penerimaan
1	Bank Pembangunan Daerah	127.537.139,00
2	Perusahaan Daerah Gemohing Flores Timur	-
3	Perusahaan Daerah Air Minum	-

Pada pos penerimaan laba usaha daerah seperti yang ditampilkan pada tabel V.11, Perusahaan Daerah Gemohing Flores Timur dan Perusahaan Air Minum (PAM) tidak memberikan kontribusi sama sekali pada pendapatan asli daerah.

- 3) Pada Tahun Anggaran 2002 tingkat kemandirian Kabupaten Flores Timur turun 0,16 % dari tingkat kemandirian sebelumnya yakni tahun anggaran 2001 sebesar 2,45 % menjadi 2,29 % pada tahun anggaran ini. Namun terjadi peningkatan dalam pendapatan asli daerah dari tahun anggaran sebelumnya, dimana pada tahun anggaran 2001 pendapatan asli daerah Kabupaten Flores Timur hanya mencapai Rp.3.253.213.764,74 dan pada tahun anggaran 2002 pendapatan asli daerah Kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan menjadi Rp.3.589.396.612,26 atau terjadi peningkatan sebesar Rp. 336.182.848,50. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan pada penerimaan pos laba Perusahaan Milik Daerah, pos lain-lain pendapatan yang sah, dan penerimaan pada pos retribusi daerah walaupun persentase kenaikan relatif kecil, meskipun pada tahun ini penerimaan pada pos pajak daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 136.146.404,93 dari Rp.530.169.749,99 pada tahun anggaran 2001 menurun menjadi Rp.394.023.345,06 pada tahun anggaran ini. Pada uraian di bawah akan diperlihatkan bagian-bagian dari pos-pos pendapatan asli daerah yang memberikan perubahan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2002.

a) Pajak Daerah

Tabel V.12
Total Penerimaan pada Pos-Pos Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2002
(dalam Rp)

No	Pos-Pos Pajak Daerah	Penerimaan
1	Pajak Hotel	24.691.995,00
2	Pajak Restoran	25.058.785,00
3	Pajak Hiburan	1.519.400,00
4	Pajak Reklame	9.643.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	207.761.505,00
6	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	125.348.660,06

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)

Terjadi perubahan yang menarik dalam pos pajak daerah pada tahun anggaran ini. Pajak hotel dan restoran yang pada tahun anggaran sebelumnya digabung kini pada tahun anggaran ini telah dipisah ke dalam dua pos yakni pajak hotel dan pajak restoran. Ada pun pos pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tidak terlihat lagi dalam tabel penerimaan pajak daerah.

b) Retribusi Daerah

Pada tabel V.13, kemajuan besar telah diraih oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur di dalam membangun daerah. Berbagai usaha sektor bisnis, perdagangan, perikanan dan pertanian telah mulai berjalan dan telah membuahkan hasil. Ini terlihat pada pengenaan berbagai retribusi ijin

usaha. Dan pada akhirnya memberikan kontribusi nyata terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Tabel V.13
Total Penerimaan pada Pos-Pos Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2002
(dalam Rp)

No	Pos Retribusi Daerah	Penerimaan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	585.798.952,00
2	Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	129.284.670,00
3	Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	3.573.100,00
4	Retribusi pasar	149.337.057,50
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	58.600.000,00
6	Retribusi Terminal	41.312.000,00
7	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	33.691.700,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	19.680.000,00
9	Retribusi IMB	9.782.229,00
10	Retribusi Ijin Trayek	21.650.000,00
11	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	52.763.820,00
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	96.993.535,00
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	3.081.000,00
14	Retribusi Ijin Tempat Usaha	5.780.000,00
15	Retribusi Ijin Usaha Industri	650.000,00
16	Retribusi Ijin Usaha	12.435.000,00

	Perdagangan			
17	Retribusi Ijin Usaha			350.000,00
	Pergudangan			
18	Retribusi Ijin Usaha			1.250.000,00
	Perikanan			

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)

c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Tabel V.14
Total Penerimaan pada Pos Lain-lain Pendapatan
Tahun Anggaran 2002
(dalam Rp)

No	Pos lain-lain Pendapatan	Penerimaan
1	Hasil penjualan barang milik daerah	500.000,00
2	Jasa Giro	914.287.560,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga	409.313.597,50
4	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah	2.125.500,00
6	Lain-Lain Penerimaan	169.318.807,00

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)

d) Laba Perusahaan Milik Daerah

Tabel V.15
Total Penerimaan pada Pos Laba Usaha Daerah
Tahun Anggaran 2002
(dalam Rp)

No	Pos Bagian Laba Usaha Daerah	Penerimaan
1	Bank Pembangunan Daerah	221.322.595,20
2	Perusahaan Daerah Gemolung	-

	Flores Timur			
3	Perusahaan Daerah Air Minum			10.000.000,00
4	BPR Bina Usaha			100.000.000,00

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)

Dari tabel V.15 di atas, Perusahaan Daerah Air Minum berhasil memberikan kontribusi sebesar Rp.10.000.000,00 jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya Perusahaan Daerah ini sama sekali tidak memberikan sumbangan pada pendapatan asli daerah. Kontribusi yang diberikan oleh Bank Pembangunan Daerah meningkat jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp. 93.785.456,00 (57,62 %). Tabel di atas juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga mulai melebarkan usaha perbankan dengan berdirinya BPR Bina Usaha dan kontribusi yang disumbangkan oleh BPR ini sebesar Rp.100.000.000,00 pada tahun pertama beroperasi. Ditunjukkan pula oleh tabel di atas bahwa Perusahaan Daerah Gemohing Flores Timur sama sekali tidak memberikan kontribusi sama sekali pada tahun anggaran ini dan tahun anggaran sebelumnya.

- 4) Pada hasil perhitungan tingkat kemandirian seperti yang ditampilkan pada tabel V.2, dalam tahun anggaran 2003 tingkat kemandirian Kabupaten Flores Timur meningkat 0,41 % dari tahun anggaran sebelumnya menjadi 2,70 %. pendapatan asli daerah dalam tahun anggaran ini mencapai Rp.4.810.386.287,33 Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya yakni tahun anggaran 2002 kenaikan

pendapatan asli daerah Kabupaten Flores Timur mencapai Rp. 1.220.989.675,07 atau meningkat sebesar 34,01 %. Proporsi terbesar disumbangkan oleh pos retribusi daerah sebesar Rp.2.027.433.349 dan disusul oleh pos Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.1.845.575.133,86 dan proporsi terendah berasal dari pos laba usaha daerah sebesar Rp.303.817.290. Yang perlu dicatat dari tahun anggaran ini adalah bahwa format atau pola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur mengalami perubahan namun perubahan tersebut tidak melenceng jauh dari format atau pola yang digunakan sebelumnya.

B. Perkembangan Tingkat Kemandirian Kabupaten Flores Timur

Untuk mengetahui perkembangan keuangan Kabupaten Flores Timur ditinjau dari tingkat kemandiriannya selama periode empat tahun anggaran, digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*), dengan rumus :

$$Y' = a + bx$$

Dimana Y' = Variabel Rasio Efektifitas

a = besarnya Y jika $x = 0$

b = Besanya perubahan Y jika x mengalami perubahan satu satuan

x = Waktu

tabel berikut menyajikan data - data yang diperlukan dalam membuat perhitungan

Tabel V.16
Trend Tingkat Kemandirian Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2000 -Tahun Anggaran 2003

Tahun Anggaran	Tingkat Kemandirian	X	XY	X ²	Y'	
	(Y)					
2000	3.39 %	-1.5 (-3)	-10.17	9	3.03	
2001	2.45 %	-0.5 (-1)	-2.45	1	2.81	
	0		0			
2002	2.29 %	0.5 (1)	2.29	1	2.59	
2003	2.70 %	1.5 (3)	8.1	9	2.37	
$\Sigma Y = 10.83 \%$		$\Sigma X = 0$	$\Sigma XY =$ -2.23	$\Sigma X^2 =$ 20		

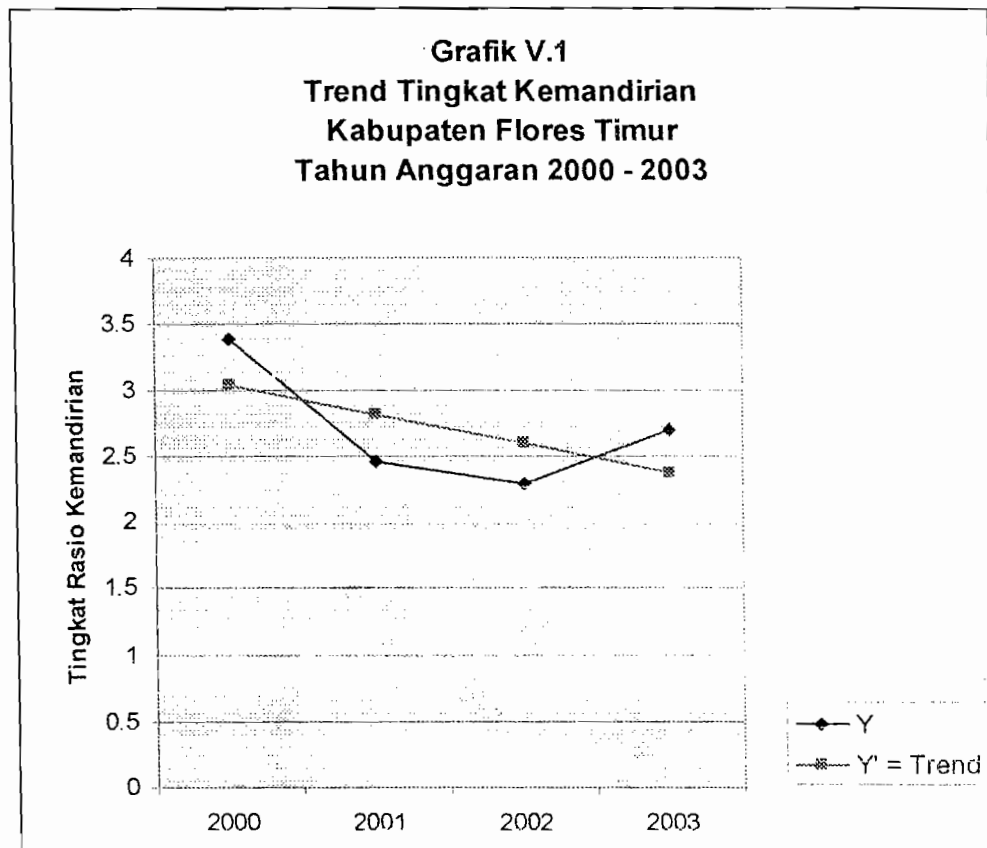
Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)

Nilai a dan b dapat di cari dengan rumus =

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} = \frac{10,83}{4} = 2,70 \text{ dan } b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{-2,23}{20} = -0,11$$

Dari data yang ditunjukkan oleh tabel di atas bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Flores Timur dalam empat tahun anggaran tersebut masih dikategorikan sangat kecil, karena tingkat kemandirian hanya berkisar antara 2,37 % sampai dengan 3,03 %. Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur mutlak berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi bantuan dari pihak - pihak lain.

Dan untuk setiap tahun anggaran tingkat kemandirian Kabupaten Flores Timur mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar minus (-) 0,11%. Sedangkan rata-rata tingkat kemandirian Kabupaten Flores Timur dalam keempat tahun anggaran tersebut adalah 2,70 %. Grafik V.1 berikut ini akan menampilkan bentuk lain dari tabel di atas untuk memperjelas trend tingkat kemandirian yang telah dijelaskan sebelumnya.



2. Perkembangan Keuangan Daerah Ditinjau dari Rasio Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

A. Analisis Rasio Efektivitas

Efektifitas (hasil guna) digunakan untuk mengukur pola hubungan antara hasil; pemungutan pendapatan asli daerah dan potensi hasil pendapatan asli daerah (target yang ditetapkan) untuk menentukan efektif tidaknya pemungutan pendapatan asli daerah digunakan asumsi sebagai berikut :

1. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi pendapatan asli daerah) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran (target pendapatan asli daerah) maka dapat dikatakan pemungutan pendapatan asli daerah semakin efektif.
2. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi pendapatan asli daerah) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran (target pendapatan asli daerah) maka dapat dikatakan pemungutan pendapatan asli daerah kurang efektif.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif, apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik.

Rumus yang digunakan adalah:

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

Secara jelas rasio efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel V.17
Rasio Efektivitas Pemungutan PAD
Tahun Anggaran 2000-2003

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Target Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektivitas (%)
2000	1.667.790.610,99	1.965.034.950,00	84,87
2001	3.253.213.764,24	3.575.057.048,00	90,99
2002	3.589.396.612,26	4.686.969.400,00	76,58
2003	4.810.386.287,33	7.790.292.590,00	61,75

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)

Berkut ini akan dijelaskan mengenai rasio efektivitas terhadap pemungutan pendapatan asli daerah berdasarkan data yang ditampilkan oleh tabel di atas :

- a. Pada tahun anggaran 2001 rasio efektivitas pada pemungutan pendapatan asli daerah di Kabupaten Flores Timur hampir mencapai 100 % yakni sebesar 90,99 %. Pada tahun anggaran ini rasio efektivitas pada Pemungutan pendapatan asli daerah mencapai titik tertinggi jika

dibandingkan dengan tiga tahun anggaran lainnya diteliti. Sedangkan pada tahun anggaran 2003, rasio efektivitas terhadap pemungutan pendapatan asli daerah mencapai titik terendah yakni hanya mencapai 61,75 % dari target pendapatan asli daerah yang ditetapkan. Secara akumulatif jika keempat tahun anggaran ini dirata-ratakan atau diambil nilai tengahnya maka rasio efektivitas pada pemungutan pendapatan asli daerah mencapai 78,55 %. Secara objektivitas dapat dikatakan bahwa rasio efektivitas akumulatif telah memberikan hasil yang cukup memuaskan, walaupun terdapat tunggakan akumulatif sebesar 21,45 %. Tunggakan akumulatif dari empat tahun anggaran adalah sebesar Rp. 4.399.322.375 dari target akumulatif sebesar Rp.18.017.353.988, dimana tunggakan terbesar terjadi pada tahun anggaran 2003 yang mencapai Rp. 2.979.906.303,67 dan tunggakan terendah dicapai pada tahun anggaran 2001 yakni sebesar Rp. 321.843.283,76.

- b. Pada tahun anggaran 2000, rasio efektivitas pada pemungutan pendapatan asli daerah adalah sebesar 84,87 %. Walaupun terdapat tunggakan atau target yang tidak dapat direalisasikan sebesar 15,13 %, secara umum dan objektif pencapaian rasio efektivitas sebesar 84,87 cukup efektif. Pos-pos yang sangat berpengaruh terhadap menurunnya rasio efektivitas adalah pada pos-pos pajak daerah, dimana tunggakan atau target yang tidak dapat direalisasikan mencapai Rp.152.125.711,00 dari target penerimaan sebesar Rp.530.005.800,00 pos retribusi daerah di mana tunggakan dari pos ini mencapai Rp.236.299.664,00 dari target penerimaan sebesar

Rp.844.504.950,00. Sedangkan satu-satunya pos yang berpengaruh terhadap kenaikan rasio efektivitas adalah pos lain-lain pendapatan, dimana realisasi penerimaan melebihi target penerimaan sebesar Rp.91.131.036,00 dari target penerimaan yang dianggarkan sebesar Rp.590.524.200,00.

- c. Pada tahun anggaran 2001 rasio efektivitas pada pemungutan pendapatan asli daerah Kabupaten Flores Timur adalah 90.99 %. seperti yang telah dijelaskan bahwa tahun anggaran ini, rasio efektivitas antara realisasi penerimaan terhadap target penerimaan hampir mencapai 100 % yakni sebesar 90,99 %. Dari total target yang dianggarkan sebesar Rp.3.575.057.048,00 dan realisasi penerimaan mencapai Rp.3.253.215.764,24 terdapat tunggakan penerimaan sebesar 9.01 %. Pos pendapatan asli daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap kenaikan rasio efektivitas karena realisasi penerimaan dari pos ini ternyata melebihi target yang ditetapkan sedangkan pos pajak daerah, pos retribusi daerah, dan pos laba perusahaan daerah menyebabkan menurunnya tingkat rasio efektivitas karena realisasi penerimaan masih di bawah dari target yang telah ditetapkan. Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran ini, pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah karena tunggakan pada tahun ini adalah yang terkecil jika dibandingkan dengan tunggakan pada tahun-tahun anggaran lain.

- c. Pada tahun anggaran 2002 ini, dari target pendapatan asli daerah yang ditetapkan sebesar Rp. 4.686.969.400,00, pemerintah daerah hanya mampu merealisasikan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 3.589.396.612,26. Dengan demikian rasio efektivitas terhadap pemungutan pendapatan asli daerah pada tahun anggaran ini sebesar 76,58 %. Rasio efektivitas untuk tahun anggaran ini jika dibandingkan dengan rasio efektivitas untuk tahun anggaran 2001 maka terjadi penurunan sebesar 14,41 %. Target pendapatan asli daerah untuk tahun anggaran ini yang tidak dapat direalisasikan atau tunggakan sebesar Rp 1.097.570.785,74.
- d. Seperti yang telah diuraikan di atas, pada tahun anggaran 2003 ini terjadi tunggakan terbesar untuk keempat tahun anggaran ini, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun anggaran ini rasio efektivitas terhadap pemungutan pendapatan asli daerah mencapat titik terendah yakni hanya sebesar 61,75 % atau dalam nilai nominal rupiah sebesar Rp.2.979.904.299,67. Tunggakan terbesar pada pos-pos pendapatan asli daerah pada tahun anggaran ini adalah pada pos lain-lain penerimaan.

B. Perkembangan Rasio Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Metode yang digunakan untuk mengetahui perkembangan rasio efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah selama empat tahun anggaran yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah metode kuadrat terkecil (*least square*) dengan rumus:

$$Y' = a + bx$$

Dimana Y' = Variabel rasio efektivitas
 a = besarnya Y jika $x = 0$
 b = Besanya perubahan Y jika x mengalami perubahan satu satuan
 x = Waktu

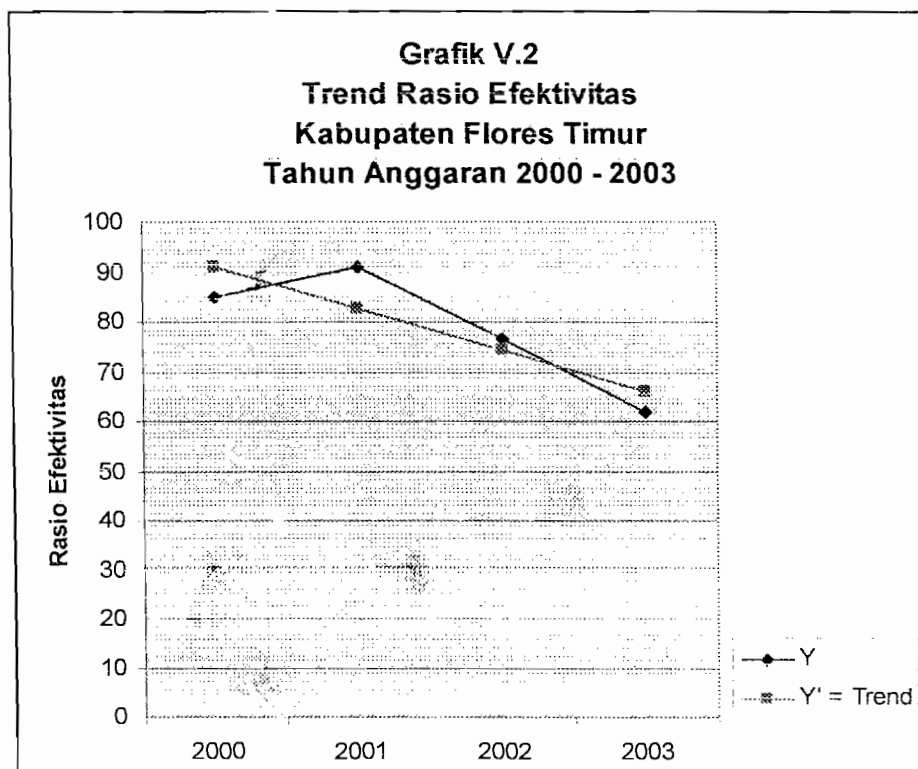
Tabel V.18
Trend Rasio Efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Flores Timur T.A 2000 - 2003
(Perhitungan dengn tahun genap)

Tahun Anggaran	Rasio Efektivitas (Y)	X	X ²	XY	Y' (trend)
2000	84.87 %	-1.5 (-3)	9	-254.61	91.12 %
2001	90.99 %	-0.5 (-1)	1	-90.99	82.74 %
	0			0	
2002	76.58 %	0.5 (1)	1	76.58	74.36 %
2003	61.75 %	1.5 (3)	9	185.25	65.98 %
$\Sigma Y = 314.19$		$\Sigma X = 0$	$\Sigma X^2 = 20$	$\Sigma XY =$ -83.77	

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus =

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} = \frac{314,19}{4} = 78,55 \text{ dan } b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{-83,77}{20} = -4,19$$

Tabel di atas dengan jelas menunjukkan bahwa pemungutan pendapatan asli daerah di Kabupaten Flores Timur kurang efektif karena realisasi pendapatan asli daerah terhadap target hanya mencapai 78.55 %. Data di atas juga memperlihatkan bahwa dalam setiap tahunnya terjadi penurunan dalam realisasi pendapatan asli daerah terhadap target yang diterapkan yakni sebesar 4.19 %. Kinerja pemerintah Kabupaten Flores Timur menurun cukup tajam dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah. Selanjutnya akan ditampilkan grafik yang akan memperjelas tabel di atas.



3. Perkembangan Keuangan Daerah ditinjau dari Rasio Efisiensi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

A. Rasio Efisiensi

Selain ditinjau dari rasio efektivitas, perkembangan keuangan daerah dapat juga ditinjau dari rasio efisiensi (tepat guna) digunakan untuk mengukur bagian dari hasil pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, bahwa rasio efisiensi pemungutan pendapatan asli daerah diperoleh dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

Berikut ini akan disajikan tabel rasio efisiensi pemungutan pajak terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Flores Timur.

Tabel V.19
Rasio Efisiensi Biaya Pemungutan PAD
Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2000 - Tahun Anggaran 2003
(Rp. 000)

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan PAD	Realisasi PAD	Rasio Efisiensi (%)
2000	35.618	1.667.790	2.13
2001	70.791	3.253.213	2.17

2002	166.565	3.589.396	4.64
2003	123.937	4.810.386	2.57

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah)

Jika kita perhatikan pada data yang diperlihatkan oleh tabel di atas, besarnya biaya yang digunakan untuk memungut PAD mengalami peningkatan setiap tahun anggaran berbanding searah dengan peningkatan realisasi pendapatan asli daerah. Walaupun pada tahun anggaran 2002 rasio efisiensi mencapai titik tertinggi yakni 4,64 % , namun secara umum dapat dikatakan bahwa aparatur pemerintah daerah telah efisien dalam melakukan pemungutan pajak.

B. Perkembangan Rasio Efisiensi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan rasio efisiensi pemungutan pendapatan asli daerah dalam setiap tahun anggaran, dapat diketahui dengan metode kuadrat tekecil (*least square*) dengan rumun : $Y' = a + bx$

Dimana Y' = Variabel Rasio Efisiensi

a = besarnya Y jika $x = 0$

b = Besanya perubahan Y jika x mengalami perubahan satu satuan

x = Waktu

Tabel V. 20
Trend Rasio Efisiensi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2000 - Tahun Anggaran 2003

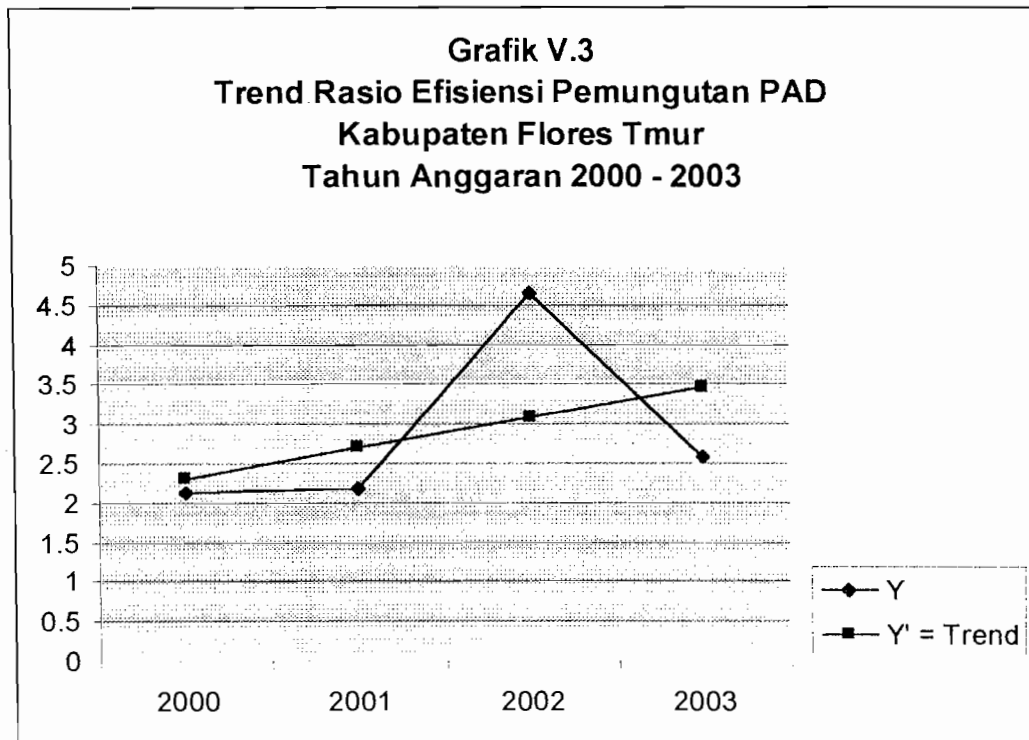
Tahun Anggaran	Rasio Efisiensi				
	(Y)	X	X ²	XY	Y' (%)
2000	2.13	-1.5 (-3)	9	-6.39	2.31
2001	2.17	-0.5 (-1)	1	-2.17	2.69
	0			0	0
2002	4.64	0.5 (1)	1	4.64	3.07
2003	2.57	1.5 (3)	9	7.71	3.45
$\Sigma Y = 11.51$		$\Sigma X = 0$	$\Sigma X^2 = 20$	$\Sigma XY = 3.79$	

Nilai a dan b dapat di cari dengan rumus =

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} = \frac{11,51}{4} = 2,88 \text{ dan } b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{3,79}{20} = 0,19$$

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa biaya pemungutan pendapatan asli daerah Kabupaten Flores Timur masih dikategorikan efisien karena dalam keempat tahun anggaran tersebut rasio efisiensinya mendekati nol, atau rata-rata setiap tahunnya adalah 2,88 % Namun terdapat kecenderungan bahwa dalam perjalanannya terjadi kenaikan persentase biaya pemungutan pendapatan asli daerah walaupun telatif kecil yakni hanya sebesar 0,19 %. Untuk memperjelas trend rasio efisiensi

pemungutan pendapatan asli daerah akan ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini :



Pada grafik V.3, diperlihatkan dengan jelas bahwa dari tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2003 terjadi kenaikan biaya pemungutan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang relative kecil. Ini menjadi mungkin karena terjadi dalam setiap tahun anggaran terjadi kenaikan pada realisasi pendapatan asli daerah. Dan untuk kasus rasio efisiensi mengalami fluktuatif. Pada tahun anggaran 2002, rasio efisiensi menurun sebesar 2,07 % menjadi 4,64 % dari 2,17 % pada tahun anggaran 2001. Ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan dalam efisiensi pemungutan pajak. Dan pada tahun anggaran 2003 tingkat efisiensi dalam pemunutan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan menjadi 2,57 % jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2002 yang mencapai 4,64 %.

4) Perkembangan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Pertumbuhan Komponen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Metode terakhir yang digunakan peneliti dalam melakukan analisa dalam rangka mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari periode ke periode berikutnya adalah dengan mengetahui pertumbuhan dari komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, khususnya pendapatan asli daerah, Total Penerimaan, Belanja Rutin, dan Belanja Pembangunan dari setiap tahun anggaran. Metode ini secara detail akan memberikan deskripsi mengenai rasio pertumbuhan dari berbagai komponen pendapatan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur. Untuk mengetahui pertumbuhan tersebut di gunakan rumus:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

dimana: P_n = data pada tahun ke-n

P_o = data pada tahun ke-0

r = pertumbuhan

Berikut ini akan ditampilkan tabel mengenai perihal di atas.

Tabel V.21
Rasio Pertumbuhan Realisasi
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2000 - Tahun Anggaran 2003
(dalam Rp.000)

No	Penerimaan	2000	2001	2002	2003
1	Pendapatan Asli Daerah	1.667.790	3.253.213	3.589.396	4.810.386
2	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-	95.06 %	10.33 %	34.01 %
3	Total Penerimaan Daerah	49.073.868	132.635.374	156.677.230	178.109.274
4	Pertumbuhan Total Penerimaan Daerah	-	170.27 %	18.13 %	13.68 %
5	Belanja Rutin	34.374.633	84.358.868	105.463.373	107.542.106
6	Pertumbuhan Belanja Rutin	-	145.41 %	25.01 %	1.97 %
7	Belanja Pembangunan	12.548.119	41.535.224	43.914.483	66.648.110
8	Pertumbuhan Belanja Pembangunan	-	231.00 %	5.73 %	51,76 %

Sumber data : Bagian Keuangan dan Sekda Kab Flores Timur (data diolah).

Dari perhitungan rasio pertumbuhan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur dari tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2003 dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur dalam empat tahun anggaran tersebut mengalami pertumbuhan yang positif dan cenderung meningkat. Tahun anggaran 2001 menjadi tahun emas bagi pemerintah Kabupaten Flores Timur karena semua komponen pendapatan asli daerah meningkat dengan rata-rata pertumbuhan diatas 100 %, . Jika kita mengacu pada tabel di atas, pada tahun anggaran 2001, pertumbuhan pendapatan asli daerah meningkat secara tajam dari tahun anggaran sebelumnya sebesar 95,06 % atau sebesar Rp 1.585.183.000. Pada dua tahun anggaran sesudahnya yakni tahun anggaran 2002 dan tahun anggaran 2003 rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah meningkat 10,33 % atau sebesar Rp. 336. 183.000 pada tahun anggaran 2002 dan 34,01 % atau sebesar Rp 1.220.990.000 pada tahun anggaran 2003. Dengan demikian rata-rata rasio pertumbuhan PAD setiap tahunnya adalah 46,47% atau sebesar Rp.1.047.532.000.

Selanjutnya pada komponen total penerimaan daerah pada tahun anggaran 2001 meningkat sebesar 170,27 % atau sebesar Rp.83.561.506.000 dari tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun anggaran 2002 rasio total penerimaan meningkat sebesar 18,13 % atau sebesar Rp. 24.041.856.000 dari tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2003 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 13,68 % dari tahun anggaran

sebelumnya atau sebesar Rp.21.432.044.000. Dengan demikian komponen total penerimaan secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 67,36 % setaiah tahunnya atau sebesar Rp.43.011.802.000.

Perkembangan pertumbuhan belanja rutin berbanding searah dengan dua komponen sebelumnya yakni komponen pendapatan asli daerah dan komponen penerimaan daerah. Pada tahun anggaran 2001 pertumbuhan belanja rutin meningkat sebesar 145,41 % atau sebesar Rp.49.984.235.000 dari tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun anggaran 2002 juga mengalami peningkatan sebesar 25,01% atau sebesar Rp.21.104.505.000. Sedangkan pada tahun anggaran 2003 mengalami pertumbuhan yang relatif kecil yakni hanya sebesar 1,97 % dari tahun anggaran 2002 atau sebesar Rp.2.078.733.000

Rata-rata pertumbuhan komponen belanja rutin setiap tahunnya adalah 57,46 % atau sebesar Rp.24.389.157.670.

Pertumbuhan belanja pembangunan juga mengikuti pos-pos yang lain. Pertumbuhan belanja pembangunan terbesar terjadi pada tahun anggaran 2001 yang mencapai 231,00 % atau sebesar Rp.28.987.105.000 dari tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun anggaran berikutnya yakni tahun anggaran 2002 pertumbuhan belanja pembangunan meningkat hanya sebesar 5,73 % atau sebesar Rp.2.379.256.000 dan pada tahun anggaran 2003 mengalami pertumbuhan yang cukup besar dari tahun anggaran sebelumnya yakni sebesar 51,76% atau sebesar Rp.22.733.627.000.

Dengan demikian rata – rata pertumbuhan setiap tahun pada komponen belanja pembangunan adalah sebesar 96,16 % atau sebesar Rp 18.033.347.000.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tingkat kemandirian Kabupaten Flores Timur selama periode tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2003 masih sangat rendah, dengan rata-rata tingkat kemandirian sebesar 2,70 % dan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,11 %. Jadi, dapat dikatakan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Flores Timur masih sangat bergantung pada pemerintah yang lebih tinggi, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
- 2) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dinilai kurang efektif dan cenderung menurun, ini dapat dilihat dari perbandingan realisasi pendapatan asli daerah terhadap target yang ditetapkan tidak mencapai angka 1 (100 %) hanya mencapai 78.55 % dan rasio efektivitas mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,19 %.
- 3) Secara umum kinerja pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah telah efisien dan cenderung semakin baik setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari rasio efisiensi setiap tahunnya yang sangat rendah dengan rata-rata 2,88 % dan mengalami pertumbuhan sebesar 0,19 %.

- 4) Pertumbuhan dan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam empat tahun anggaran tersebut mengalami pertumbuhan positif dan cenderung meningkat, hanya saja tingkat pertumbuhannya tidak stabil. Secara umum rata - rata pertumbuhan pendapatan asli daerah setiap tahunnya adalah sebesar 46,46 %. Pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah terbesar dicapai pada tahun anggaran 2001 sebesar 95,06 %. Rata-rata persentase pertumbuhan penerimaan daerah pada keempat tahun anggaran adalah sebesar 67,36 %. Persentase penerimaan tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2001 dan terendah dicapai pada tahun anggaran 2003. Pada bagian pertumbuhan realisasi pos belanja rutin , tahun anggaran 2001 merupakan tahun anggaran dengan realisasi pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan dengan tahun anggaran lainnya yakni sebesar 145,41 % dan menurun secara berturut-turut pada kedua tahun anggaran berikutnya yakni 25,01 % dan 1,97 %. Secara umum peningkatan realisasi pertumbuhan belanja rutin pada keempat tahun anggaran ini adalah 57,46 %. Demikian pula dengan persentase pertumbuhan realisasi pada belanja pembangunan, tahun anggaran 2001 merupakan puncaknya dengan persentase pertumbuhan belanja pembangunan sebesar 231,00 % dan pada kedua tahun anggaran berikutnya yakni tahun anggaran 2002 dan tahun anggaran 2003 persentase pertumbuhan pada pos belanja

pembangunan mengalami penurunan menjadi sebesar 5,73 % dan 5,17 %. Namun secara akumulatif persentase rata - rata pertumbuhan pada pos belanja rutin adalah 80,63 %.

B. Keterbatasan

- 1) Belum adanya standarisasi terhadap rasio efektivitas dan rasio efisiensi dari pemerintah Kabupaten Flores Timur sehingga terdapat kesulitan dari peneliti untuk mengambil kesimpulan mengenai tingkat rasio efektivitas dan rasio efisiensi tertentu, apakah sudah dikategorikan efektif dan efisien.
- 2) Dalam melakukan penelitian, penulis tidak meneliti lebih jauh factor - factor yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Penulis hanya menganalisis berdasarkan data yang tersedia.

C. Saran

- 1) Pemerintah pusat sebaiknya mengeluarkan ketetapan tentang ukuran mengenai batasan dari masing-masing parameter untuk mengukur kemampuan daerah.
- 2) Bagi yang berminat untuk melakukan penelitian tentang rasio keuangan daerah sebaiknya tidak hanya meneliti kondisi keuangan daerah tetapi meneliti juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah seperti Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan faktor-faktor lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra (2001). *Akuntansi Sektor Publik Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi FE-UGM.
- Devas, Nick (1987). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Halim, Abdul (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mamesah, D.J.(1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nadeak Ruslina. Sr. (2003). *Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi tidak dipublikasiakan. Universitas Sanata Dharma.
- Republik Indonesia (1974). *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Undang-Undang No.5 Tahun 1974.
- Supranto, J. (1990). *Statistika Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Wajong, J. (1962). *Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Ichtiar.
- Yenni (2000). *Beberapa Teori Otonomi Daerah*. Media Akuntansi No, 15/Th VII Nov – Des.

LAMPIRAN

R I N G
PERHITUNGAN ANGGARAN
DAERAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN :

NO	U R A I A N	J U M L A H	
		ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
I	PENDAPATAN		
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	Rp. 3,011,454,400.00	Rp 3,011,454,499.68
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI :	Rp. 1,965,034,950.00	Rp 1,667,790,610.99
	a. Pajak Daerah	Rp. 530,005,800.00	Rp 377,930,088.99
	b. Retribusi Daerah	Rp. 844,504,950.00	Rp 608,205,286.00
	c. Bagian Laba Usaha Daerah	Rp. 0.00	Rp 0.00
	d. Lain-lain Pendapatan	Rp. 590,524,200.00	Rp 681,655,236.00
3.	PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAN ATAU INSATNSI YANG LEBIH TINGGI :	Rp. 42,842,505,200.00	Rp 44,394,623,683.24
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp. 2,280,024,000.00	Rp 3,303,966,489.64
	b. Bagi hasil Bukan Pajak	Rp. 153,500,000.00	Rp 504,818,879.60
	c. Subsidi Daerah Otonom	Rp. 30,353,196,200.00	Rp 30,530,056,314.00
	d. Bantuan Pembangunan	Rp. 10,055,785,000.00	Rp 10,055,782,000.00
4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 0.00	Rp 0.00
	a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	Rp. 0.00	Rp 0.00
	b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	Rp. 0.00	Rp 0.00
J U M L A H		Rp. 47,818,994,550.00	Rp 49,073,863,793.91
BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN		Rp. 5,967,040,829.00	Rp 2,724,308,814.00

K
P
F
2
NO

K A S A N
PENDAPATAN DAN BELANJA
FLORES TIMUR
2000.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
N O M O R : 12 TAHUN 2001

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2001

C - I / A

NO	U R A I A N	J U M L A H	
		ANGGARAN	REALISASI
5	6	7	8
II	BELANJA		
A.	R U T I N	Rp. 34,616,701,250.00	Rp. 34,374,633,883.78
	1. Belanja Pegawai	Rp. 29,802,430,450.00	Rp. 29,890,869,108.00
	2. Belanja Barang	Rp. 2,456,379,500.00	Rp. 2,453,403,124.00
	3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 467,353,000.00	Rp. 434,952,914.00
	4. Belanja Perjalanan	Rp. 872,774,250.00	Rp. 746,607,331.66
	5. Belanja lain-lain	Rp. 0.00	Rp. 0.00
	6. Angs. Pinj. Hutang & Bunga	Rp. 15,000,000.00	Rp. 15,000,000.00
	7. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	Rp. 472,215,000.00	Rp. 413,146,704.12
	8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	Rp. 411,568,100.00	Rp. 372,427,702.00
	9. Pengeluaran yg tdk tersangka	Rp. 118,980,950.00	Rp. 48,227,000.00
B.	PEMBANGUNAN	Rp. 13,202,293,300.00	Rp. 12,548,119,511.13
1	Sektor Industri	Rp. 95,750,000.00	Rp. 94,265,000.00
2	Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp. 1,826,816,000.00	Rp. 1,683,900,450.00
3	Sektor Sumber daya air dan Irigasi	Rp. 85,000,000.00	Rp. 84,993,696.00
4	Sektor Tenaga Kerja	Rp. 50,000,000.00	Rp. 49,654,000.00
5	Sektor Perdagangan, pengembangan usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	Rp. 330,000,000.00	Rp. 315,000,000.00
6	Sektor Transportasi	Rp. 2,078,916,100.00	Rp. 2,048,031,426.88
7	Sektor Pertambangan dan Energi	Rp. 0.00	Rp. 0.00
8	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	Rp. 80,000,000.00	Rp. 80,000,000.00
9	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	Rp. 772,536,700.00	Rp. 740,668,757.00
10	Sektor Lingkungan dan Tata ruang	Rp. 832,628,850.00	Rp. 819,982,350.00
11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan dan Olahraga	Rp. 1,481,732,750.00	Rp. 1,444,105,220.00
12	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp. 115,000,000.00	Rp. 109,243,550.00
13	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan wanita, Anak dan remaja	Rp. 1,094,538,000.00	Rp. 1,087,817,950.00
14	Sektor Perumahan dan pemukiman	Rp. 1,269,508,900.00	Rp. 1,200,835,961.25
15	Sektor A g a m a	Rp. 85,000,000.00	Rp. 85,000,000.00
16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp. 61,000,000.00	Rp. 60,964,000.00
17	Sektor H u k u m	Rp. 130,000,000.00	Rp. 130,000,000.00
18	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Rp. 2,561,266,000.00	Rp. 2,331,114,650.00
19	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Medya Massa	Rp. 130,000,000.00	Rp. 75,524,500.00
20	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	Rp. 122,500,000.00	Rp. 107,018,000.00
	J U M L A H	Rp. 47,818,994,550.00	Rp. 46,922,753,394.91
	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	Rp. 5,967,040,829.00	Rp. 2,724,308,814.00

RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN
KABUPATEN

IO	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	Rp 2.151.115.399,00	Rp 2.151.115.399,00
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 3.575.057.048,00	Rp 3.253.213.764,24
	a. Pajak daerah	Rp 624.972.000,00	Rp 530.169.749,99
	b. Retribusi daerah	Rp 1.625.609.298,00	Rp 1.202.663.505,50
	c. Laba Perusahaan Milik Daerah	Rp 226.599.250,00	Rp 127.537.139,00
	d. Lain - Lain PAD Yang Sah	Rp 1.097.876.500,00	Rp 1.392.843.369,75
3	Dana Perimbangan	Rp 122.656.084.576,00	Rp 123.251.132.560,30
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp 4.768.084.724,00	Rp 6.161.881.203,30
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 997.002.852,00	Rp 215.778.962,00
	c. Dana Alokasi Umum	Rp 115.090.997.000,00	Rp 115.073.472.395,00
	d. Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -
	e. Dana Darurat	Rp 1.800.000.000,00	Rp 1.800.000.000,00
4	Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -
	a. Pinjaman Dalam Negeri		Rp -
	b. Pinjaman Luar Negeri		Rp -
5	Lain - Lain Penerimaan Yang Sah	Rp 3.979.913.000,00	Rp 3.979.913.000,00
	J U M L A H	Rp 132.362.170.023,00	Rp 132.635.374.723,54
	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	6.954.458,369,00	7.868.083.046,00

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2001

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur
Nomor : 17 TAHUN 2002
Tanggal : 29 JULI 2002

NO	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	BELANJA RUTIN	Rp 88.368.502.970,00	Rp 84.358.868.100,48
	a. Belanja Pegawai	Rp 66.549.256.147,00	Rp 65.802.394.081,00
	b. Belanja Barang	Rp 8.455.245.118,00	Rp 7.714.729.572,00
	c. Belanja Pemeliharaan	Rp 1.614.597.000,00	Rp 1.262.473.527,00
	d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2.040.992.500,00	Rp 1.584.523.850,00
	e. Belanja Lain - Lain	Rp 3.202.354.515,00	Rp 2.940.324.409,28
	f. Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga	Rp 30.000.000,00	Rp -
	g. Pensiun dan Onderstand	Rp -	Rp -
	h. Bantuan Keuangan	Rp 2.128.650.000,00	Rp 1.595.777.561,20
	i. Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain	Rp 2.254.903.200,00	Rp 1.880.600.000,00
	j. Pengeluaran Tidak Tersangka	Rp 2.092.504.490,00	Rp 1.578.045.100,00
2	BELANJA PEMBANGUNAN	Rp 43.993.667.053,00	Rp 41.535.224.362,42
	1. Sektor Industri	Rp 123.500.000,00	Rp 123.500.000,00
	2. Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan	Rp 4.157.786.077,00	Rp 3.953.458.577,00
	3. Sektor Pengairan	Rp 520.000.000,00	Rp 504.836.060,00
	4. Sektor Tenaga Kerja	Rp 195.000.000,00	Rp 158.448.750,00
	5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha, Nasional, Keuangan dan Koperasi	Rp 6.174.500.000,00	Rp 6.149.852.699,00
	6. Sektor Transportasi, Metereologi & Geofisika	Rp 8.353.288.175,00	Rp 8.072.237.692,67
	7. Sektor Pariwisata & Telekomunikasi	Rp 906.031.800,00	Rp 828.690.200,00
	8. Sektor Pembangunan Daerah & Transmigrasi	Rp 4.127.465.500,00	Rp 3.597.366.460,00
	9. Sektor Lingkungan Hidup & Tata Ruang	Rp 205.000.000,00	Rp 140.405.050,00
	10. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 2.445.076.180,00	Rp 2.241.566.458,00
	11. Sektor Kependudukan & Kel. Berencana	Rp 91.000.000,00	Rp 90.700.000,00
	12. Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Anak & Remaja	Rp 5.107.067.350,00	Rp 4.979.237.459,00
	13. Sektor Perumahan & Pemukiman	Rp 3.552.714.741,00	Rp 3.175.090.614,75
	14. Sektor Agama	Rp 1.150.450.000,00	Rp 1.142.681.500,00
	15. Sektor Ilmu Pengetahuan & Teknologi	Rp 223.450.000,00	Rp 223.200.000,00
	16. Sektor Hukum	Rp 180.680.000,00	Rp 127.830.000,00
	17. Sektor Aparatur Negara & Pengawasan	Rp 5.290.957.230,00	Rp 5.081.262.492,00
	18. Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri dan Penerangan	Rp 496.600.000,00	Rp 435.804.100,00
	19. Sektor Pertahanan & Keamanan	Rp 693.100.000,00	Rp 509.056.250,00
	J U M L A H	Rp 132.362.170.023,00	Rp 125.894.092.462,90
	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	6.954.458.369,00	7.868.083.046,00

RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN
KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN

NO	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	Rp 6,741,202,261.00	Rp 6,741,282,260.64
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 4,686,969,400.00	Rp 3,589,396,612.26
	a. Pajak Daerah	Rp 697,810,000.00	Rp 394,023,345.06
	b. Retribusi Daerah	Rp 1,649,619,500.00	Rp 1,167,347,210.50
	c. Laba Perusahaan Milik Daerah	Rp 559,072,600.00	Rp 331,322,595.20
	d. Lain - lain PAD Yang Sah	Rp 1,780,467,300.00	Rp 1,696,703,428.50
3	Dana Perimbangan	Rp 144,430,677,584.00	Rp 142,027,539,110.00
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp 8,186,717,564.00	Rp 6,363,731,660.00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 973,960,020.00	Rp 404,857,450.00
	c. Dana Alokasi Umum	Rp 134,170,000,000.00	Rp 134,170,000,000.00
	d. Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -
	e. Dana Darurat	Rp 1,100,000,000.00	Rp 1,088,950,000.00
4	Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -
	a. Pinjaman Dalam Negeri	Rp -	Rp -
	b. Pinjaman Luar Negeri	Rp -	Rp -
5	Lain - lain Penerimaan Yang Sah	Rp 4,411,800,900.00	Rp 4,319,012,730.26
	a. Bantuan dari Pemerintah	Rp 2,650,000,000.00	Rp 2,603,218,750.00
	b. Bantuan dari Propinsi	Rp 1,761,800,900.00	Rp 1,715,793,980.26
J U M L A H		Rp 160,270,730,145.00	Rp 156,677,230,713.16
BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN		Rp 7,260,000,000.00	7,277,321,334.00

121

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
FLORES TIMUR
2002

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur
Nomor : 3 TAHUN 2003.
Tanggal : 6 AGUSTUS 2003.

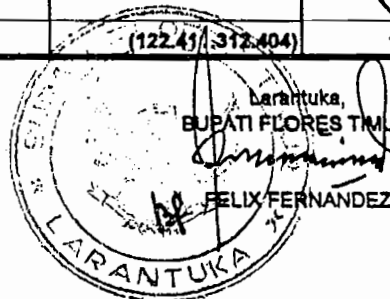
NO	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	BELANJA RUTIN	Rp 109,734,629,708.00	Rp 105,463,373,088.74
	a. Belanja Pegawai	Rp 68,253,142,018.00	Rp 67,722,014,434.00
	b. Belanja Barang	Rp 12,642,032,575.00	Rp 11,512,369,969.80
	c. Belanja Pemeliharaan	Rp 7,061,469,260.00	Rp 6,137,552,125.70
	d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp 3,482,180,000.00	Rp 3,255,002,680.00
	e. Belanja Lain.- Lain	Rp 7,955,279,325.00	Rp 7,333,326,561.24
	f. Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga	Rp -	Rp -
	g. Pensiun dan Onderstand	Rp -	Rp -
	h. Bantuan Keuangan	Rp 4,500,070,000.00	Rp 4,093,345,000.00
	i. Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain	Rp 5,697,960,000.00	Rp 5,293,248,600.00
	j. Pengeluaran Tidak Tersangka	Rp 142,496,530.00	Rp 116,513,718.00
2	BELANJA PEMBANGUNAN	Rp 50,536,100,437.00	Rp 43,914,483,945.73
	a. Sektor Industri	Rp 35,000,000.00	Rp 35,000,000.00
	b. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp 8,785,020,673.00	Rp 8,415,747,448.00
	c. Sektor Pengairan	Rp 75,000,000.00	Rp 73,897,250.00
	d. Sektor Tenaga Kerja	Rp -	Rp -
	e. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	Rp 6,076,000,000.00	Rp 6,076,000,000.00
	f. Sektor Transportasi, Meteorologi & Geofisika	Rp 13,841,393,207.00	Rp 8,149,220,035.73
	g. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	Rp 623,243,850.00	Rp 612,053,000.00
	h. Sektor Pembangunan Daerah & Transmigrasi	Rp 4,125,272,140.00	Rp 4,097,791,140.00
	i. Sektor Lingkungan Hidup & Tata Ruang	Rp 113,500,000.00	Rp 113,500,000.00
	j. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 5,284,629,500.00	Rp 5,122,722,250.00
	k. Sektor Kependudukan & Keluarga Berencana	Rp -	Rp -
	l. Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Anak & Remaja	Rp 1,256,502,878.00	Rp 1,241,885,128.00
	m. Sektor Perumahan & Pemukiman	Rp 2,522,689,151.00	Rp 2,511,615,501.00
	n. Sektor Agama	Rp -	Rp -
	o. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp 228,250,000.00	Rp 228,050,000.00
	p. Sektor Hukum	Rp -	Rp -
	q. Sektor Aparatur Negara & Pengawasan	Rp 2,600,099,038.00	Rp 2,271,300,538.00
	r. Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri dan Penerangan	Rp 369,500,000.00	Rp 368,101,655.00
	s. Sektor Pertahanan dan Keamanan	Rp 4,600,000,000.00	Rp 4,597,600,000.00
	J U M L A H	Rp 160,270,730,145.00	Rp 149,377,857,034.47
	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	7,260,000,000.00	7,277,321,334.00

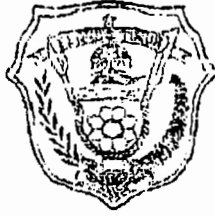
**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2003**

NO	URAIAN	APBD 2003		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN	176.868.798.950,00	178.109.274.116,33	100,70
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.790.292.590,00	1.810.386.287,33	61,75
a.	Pajak Daerah	720.299.951,00	633.560.514,47	87,96
b.	Retribusi daerah	2.293.337.839,00	2.027.433.349,00	88,41
a.	Laba usaha Daerah	657.750.000,00	303.817.290,00	47,64
a.	Lain-lain Penorimaan	4.138.904.800,00	1.845.575.133,86	44,59
2	DANA PERLUBANGAN	159.575.475.560,00	162.851.740.679,00	102,05
a.	Pos Bagi Hasil Pajak	6.335.475.560,00	9.761.740.679,00	154,08
b.	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	150.000.000,00	-	0,00
c.	Pos Dana alokasi Umum	146.690.000.000,00	146.690.000.000,00	100,00
d.	Pos Dana alokasi Khusus	6.400.000.000,00	6.400.000.000,00	100,00
e.	Pos Dana Darurat	-	-	-
J	BAGIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	9.503.030.800,00	10.447.147.150,00	109,93
a.	Bantuan dari Pemerintah	7.684.936.000,00	9.448.346.000,00	122,95
b.	Bantuan dari Propinsi	1.818.094.800,00	998.801.150,00	54,94
D	BELANJA	299.280.111.354,00	174.090.216.746,02	58,20
A	APARATUR DAERAH	73.246.054.465,00	47.825.035.291,50	65,29
1	Belanja Administrasi Umum:	55.896.704.618,00	44.130.230.394,50	78,95
a.	Belanja Pegawai / Personalia	39.390.987.616,00	33.523.455.610,50	85,15
b.	Belanja Barang	6.731.417.080,00	4.561.986.616,00	67,77
c.	Belanja Perjalanan Dinas	6.362.415.000,00	4.800.634.150,00	75,15
d.	Belanja Pemeliharaan	3.395.385.222,00	1.234.154.018,00	36,34
2	Belanja Operasi Pemeliharaan:	8.179.743.671,00	2.013.424.522,00	24,61
a.	Belanja Pegawai / Personalia	1.263.205.931,00	285.559.000,00	22,61
b.	Belanja Barang	3.630.654.825,00	994.694.250,00	24,64
c.	Belanja Perjalanan Dinas	788.713.000,00	144.443.000,00	18,31
d.	Belanja Pemeliharaan	2.497.169.815,00	688.728.272,00	27,58
3	Belanja Modal	5.169.665.376,00	1.081.380.375,00	18,34

bp

VO	URAIAN	APBD 2003		%
		ANGGARAN	REALISASI	
B	PELAYANAN PUBLIK	196.811.667.016,00	107.542.106.433,00	54,64
1	Belanja Administrasi Umum	63.674.503.929,00	59.803.202.812,00	93,92
a	Belanja Pegawai /Personalia	60.338.487.429,00	58.118.871.219,00	96,32
b	Belanja Barang	1.526.529.500,00	582.456.443,00	38,16
c	Belanja Perjalanan Dinas	983.300.000,00	621.663.700,00	63,22
d	Belanja Pemeliharaan	826.187.000,00	480.211.450,00	58,12
2	Belanja Operasi Pemeliharaan	36.110.892.423,00	11.328.227.300,00	31,37
a	Belanja Pegawai /Personalia	4.760.531.750,00	1.579.345.700,00	33,18
b	Belanja Barang	21.756.732.173,00	4.206.079.765,00	19,33
c	Belanja Perjalanan Dinas	2.198.247.000,00	919.069.700,00	41,81
d	Belanja Pemeliharaan	7.395.181.500,00	4.623.732.135,00	62,52
3	Belanja Modal	97.026.470.664,00	36.410.676.321,00	37,53
C	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN.	28.222.389.873,00	15.973.248.500,00	56,60
D	BELANJA TIDAK TERSANGKA	1.000.000.000,00	2.849.826.521,52	284,98
	JUMLAH BELANJA	299.280.111.354,00	174.190.216.746,02	58,20
	SURPLUS (DEFISIT)	(122.411.312.404,00)	3.919.057.370,31	(3,20)
	PEMBIAYAAN			
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6.465.571.737,29	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	-	6.465.571.737,29	
	Transfer Dari Dana cadangan	-	-	
	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-	
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipsahkan	-	-	
	Penerimaan Piutang	-	-	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	
	Transfer ke Dana Cadangan	-	-	
	Penyertaan Modal	-	-	
	Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	-	-	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan.	-	-	
	SILPA TAHUN ANGGARAN BERKENAN	(122.411.312.404)	10.384.629.108	





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANG DAN LINMAS)

Jalan Ile Nepo Telp. (0383) 21014, Fax (0383) 21994
LARANTUKA

SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI
UNTUK MENGADAKAN SURVEY / RESEARCH
NOMOR : 148.a / BKBL / III / FLT / XI / 2004

MEMBACA : Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Nomor 31/Kaprodi Akt./07938/IX/2004 tanggal 14 Oktober 2004 Perihal Pemberitahuan Penelitian.

MENINGGAT : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor S / D 5 / 2 / 12 tanggal 5 Juli 1972;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 070 / 2170 tanggal 10 Juni 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian

MENERANGKAN : TIDAK BERKEBERATAN

Kepada : YOHANES PAULUS T. TUKAN.
Nip / Nirm / Nim : 992114160
Pekerjaan : MAHASISWA.
Untuk : MENGADAKAN PENELITIAN
Judul Tulisan : "ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2000 – 2003 STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR"
Lokasi Penelitian : Kabupaten Flores Timur.
Lama Penelitian : 2 (dua) Bulan

DENGAN KETENTUAN :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan penelitian kepada Pemerintah setempat;
2. Selama mengadakan penelitian tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak dibenarkan melakukan hal – hal yang mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Wajib melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Flores Timur;
5. Rekomendasi ini akan batal, apabila pemegangnya tidak memenuhi ketentuan – ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperiunya dan diminta agar INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA yang dihubungi dapat memberikan bantuan / fasilitas kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Larantuka, 20 Oktober 2004

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Dekan Fakultas Ekonomi Sanata Dharma Yogyakarta di Yogyakarta

Ap. BUPATI FLORES TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN FLORES TIMUR,
KESISIAGAAN,
DOMI OLA RABEN, BA
PEMBINA
NIP. 620015613